



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020-2021

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan pencapaian pembangunan Kabupaten Situbondo tahun 2020-2021 melalui strategi pengarusutamaan gender sebagai satu kesatuan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Situbondo Tahun 2020-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 30);

20. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

9. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya yang berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
10. Responsif gender adalah suatu proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan terutama terkait akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat.
11. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Anggaran responsif gender yang selanjutnya disebut ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
13. Data terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur.
14. Tim Driver adalah penggerak bagi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program/kegiatan yang responsif gender.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi dan lembaga di Daerah.
16. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
17. Partisipasi Masyarakat adalah wujud keterlibatan dan peran serta masyarakat Kabupaten Situbondo secara aktif dan utuh dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam pembangunan di Kabupaten Situbondo melalui implementasi PUG.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan Rencana Aksi Daerah PUG Tahun 2020-2021 adalah :

- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. memberi acuan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada perangkat daerah.

Pasal 3

Tujuan penetapan Rencana Aksi Daerah PUG Tahun 2020-2021 adalah:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun 2020-2021 agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah;
- b. sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi Daerah PUG Tahun 2020-2021 meliputi penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Sosialisasi Pengarusutamaan Gender, Implementasi Gender dan Optimalisasi Pemantauan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG Tahun 2020-2021 disusun berdasarkan Capaian target kinerja tahun sebelumnya dan selanjutnya merupakan bahan evaluasi terhadap kesulitan dan keberhasilan pelaksanaan program pengarusutamaan gender.

- (3) Penetapan target kinerja tahun 2020-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian pengarusutamaan gender tahun 2020-2021.

Pasal 5

Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memuat :

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) Rencana Aksi Daerah PUG Tahun 2020-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : ANALISA SITUASI
PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB III : ISU GENDER

BAB IV : RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSTAMAAN GENDER

BAB V : PENUTUP

- (2) Rencana Aksi Daerah PUG Tahun 2020-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Tim Driver PUG melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah PUG Tahun 2020-2021.

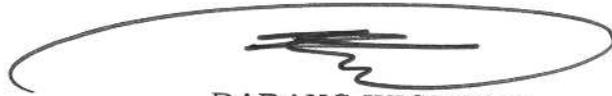
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 06 JAN 2020

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 06 JAN 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 06 JAN 2020

Nomor : 2 Tahun 2020.

BAB I

Pendahuluan

1.1.Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi dalam pembangunan nasional, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan nasional. Selanjutnya di tahun 2011, diterbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) empat menteri yaitu Menteri PPN/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor : 270/M.PPN/11/2012; SE-33/MK.02/2012; 050/4379A/SJ; SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Dengan terbitnya Surat Edaran ini diharapkan strategi PUG dalam pembangunan lebih fokus ke dalam proses penyusunan dan konten dokumen perencanaan daerah dan penganggaran daerah, yaitu RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA OPD dan RKA OPD.

Upaya peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan telah tersirat dalam lima falsafah dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan RPJMN Tahun 2009-2014, RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Pancasila sebagai cara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai status, hak, dan kewajiban, serta kesempatan yang sama di dalam keluarga dan masyarakat. Namun sampai saat ini masih banyak perempuan yang masih terabaikan karena kurangnya informasi dan kurangnya menyadari hak-hak mereka sebagai warga negara dalam pembangunan.

Pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan ruang yang cukup besar bagi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender baik dari sisi regulasi maupun non regulasi berupa program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan regulasi yang ada, Pasal 27 ayat (1) dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah menegaskan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Sangat tegas dan jelas, bahwa semua warga Negara Indonesia (baik laki-laki maupun perempuan) sama di mata hukum dan pemerintahan. Namun ketegasan dan jelasnya pasal di dalam UUD 1945 ternyata belum mampu memberikan jaminan kepada seluruh warga Negara Indonesia Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan namun hingga saat ini masih dijumpai adanya kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan terutama di dalam memperoleh akses, berpartisipasi, kontrol dan terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunannya.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1995, yang menyepakati "Beijing Declaration and Platform for Action" dan strategi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan. Namun hingga saat ini masih dijumpai adanya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, berpartisipasi, control dan terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan.

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut di atas, dan sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, kemudian UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Situbondo merespon kebijakan nasional tersebut dengan menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) agar menjadi panduan dan arahan dari para pemangku kepentingan di Kabupaten Situbondo di dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek pembangunan daerah.

RAD PUG diharapkan secara komprehensif mampu mengakomodasi berbagai peran dan kontribusi parapihak di dalam mewujudkan terjadinya kesetaraan dan keadilan gender di wilayah atau unit-unit kerja masing-

masing. RAD PUG sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah ini berisi tentang kegiatan apa yang harus dilakukan oleh parapihak, kemudian berisi pula tentang siapa dan dengan cara bagaimana untuk menjalankan rencana-rencana aksi daerah ini dan untuk kemudian RAD PUG ini dapat digunakan juga untuk menilai sejauh mana efektifitas kegiatan dengan mencermati output serta outcome dari aktivitas yang dilaksanakan sehingga strategi PUG benar-benar dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

1.2 Undang-undang dan Peraturan Terkait

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 9 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
- 11 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
- 13 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018;

- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 15 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
- 16 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
- 19 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 30);
- 20 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 11);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) ini adalah untuk memberikan acuan/arahan kepada setiap *stakeholders* dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong mempercepat tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG Kabupaten Situbondo adalah:

1. Mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
2. Sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (monev) pada setiap tahapan pembangunannya;
3. Mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi pelaksanaannya karena adanya indikator yang terukur;
4. Memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi dan para pemangku kepentingan daerah di Kabupaten Situbondo dalam mengimplementasikan strategi PUG;

1.4. Sasaran

Sasaran dari Rencana Aksi Daerah PUG ini adalah semua stakeholder pemerintah dan non pemerintah yang meliputi para perencana, pelaksana, pemantau dan pengawas pembangunan daerah di Kabupaten Situbondo.

1.5. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Daerah PUG Kabupaten Situbondo disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Undang-Undang dan Peraturan Terkait
- 1.3. Maksud dan Tujuan

- 1.4. Sasaran
- 1.5. Sistematika Penyusunan
- 1.6. Metodologi
- BAB II. Analisa Situasi Pengarusutamaan Gender
 - 2.1. Aspek Pendidikan
 - 2.2. Aspek Kesehatan
 - 2.3. Aspek Politik dan Ekonomi
- BAB III. Isu Gender
 - 3.1. Permasalahan Gender
 - 3.2. Isu Gender
- BAB IV. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender
 - 4.1. PUG dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Daerah
 - 4.2. PUG dalam Siklus Pembangunan
 - 4.3. Penguatan Kelembagaan PUG di Daerah
 - 4.4. Penguatan Peran Serta Masyarakat
 - 4.5. Matriks Rencana Aksi
- BAB V. Penutup

1.6. Tata Kerja

Proses menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender ini dilaksanakan dengan tata kerja sebagai berikut:

1. Membentuk tim penyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender, berupa Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG);
2. Pokja PUG kemudian membuat kuesioner untuk mendapatkan informasi dari OPD terkait, berupa data primer maupun sekunder;
3. Tim mengumpulkan data terpilah dan kemudian melakukan tabulasi atas data pilah yang diperoleh;
4. Data pilah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis gender;
5. Mengkaji isu-isu strategis di Kabupaten Situbondo;
6. Membuat rancangan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Situbondo;
7. FGD bersama para pemangku kepentingan terkait rancangan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) yang telah tersusun;
8. Finalisasi RAD PUG Kabupaten Situbondo Tahun 2020-2021.

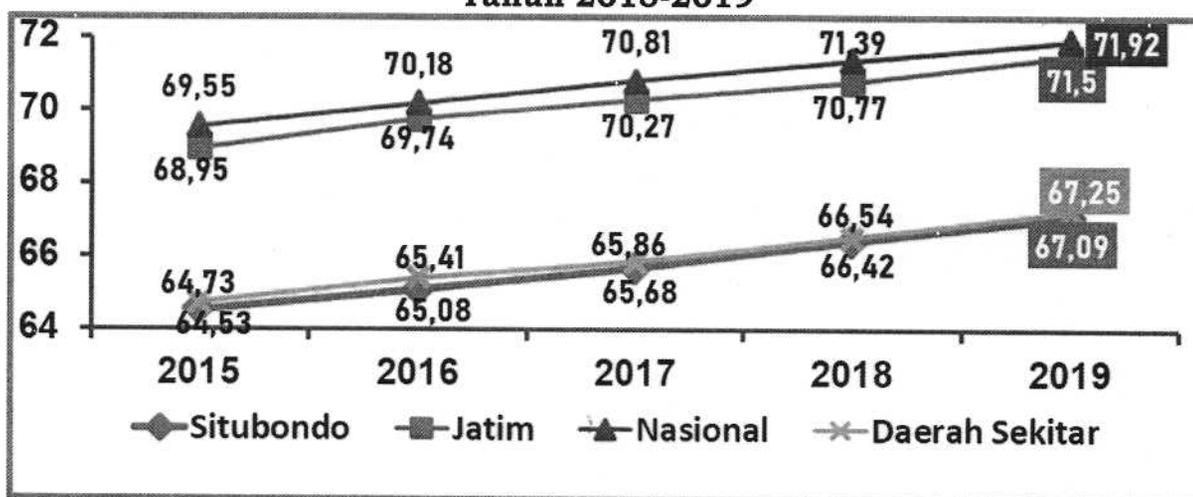
BAB II

Analisa Situasi Pengarusutamaan Gender

IPM atau Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

IPM Situbondo mengalami peningkatan setiap tahun, dan naik cukup signifikan sampai tahun 2019 yaitu dengan capaian 67,09, dan masih lebih baik dari beberapa kabupaten sekitar. Namun capaian ini masih dibawah Jawa Timur dan Nasional, tetapi rata-rata capaian per tahun masih lebih tinggi, yaitu Situbondo 0,64, Jawa Timur 0,6375 dan Nasional 0,5925.

Grafik 2.1.
IPM Situbondo, Jawa Timur, Kabupaten Sekitar, dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Tabel 2.1.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Jenis Kelamin Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sekitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019

Provinsi/ Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Jenis Kelamin									
	Perempuan					Laki-laki				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
JAWA TIMUR	69.09	68.32	67.86	67.34	66.78	76.00	75.27	74.77	74.23	73.32
Jember	60.94	60.21	59.42	-	57.43	72.29	71.48	70.47	-	68.74
Banyuwangi	65.48	64.76	64.26	-	62.39	75.43	74.92	74.55	-	72.54
Bondowoso	63.81	62.98	62.23	-	61.01	70.57	70.06	69.55	-	68.09

Provinsi/ Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Jenis Kelamin									
	Perempuan					Laki-laki				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
Situbondo	63.31	62.61	61.96	-	60.66	72.68	72.22	71.40	-	69.59
Probolinggo	60.63	59.88	59.26	-	58.10	71.37	70.56	70.07	-	69.25
INDONESIA	69.18	68.63	68.08	67.44	66.98	75.96	75.43	74.85	74.26	73.58

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2015-2019

Dari tabel di atas tampak bahwa IPM Kabupaten Situbondo menurut jenis kelamin perempuan pada tahun 2019 sebesar 63,31, dan masih lebih baik daripada Kabupaten Jember dan Probolinggo, namun masih dibawah dari Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jawa Timur dan nasional. Namun apabila dibandingkan antara IPM perempuan dan IPM laki-laki di Situbondo, tampak bahwa IPM perempuan lebih rendah dari IPM laki-laki. Hal yang sama dialami juga oleh kabupaten sekitar, Jawa Timur dan nasional.

Tabel 2.2.
Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Situbondo,
Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019

Komponen Pembentuk IPM	Situbondo	Jawa Timur	Nasional
Angka Harapan Hidup	68,97 tahun	71,18 tahun	71,34 tahun
Harapan Lama Sekolah	13,14 tahun	13,16 tahun	12,95 tahun
Rata-rata Lama Sekolah	6,12 tahun	7,59 tahun	8,34 tahun
Pengeluaran per Kapita	10,097 juta rupiah	11.739 juta rupiah	11.29 juta rupiah
IPM	67,09	71,50	71,98

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2019

Indeks Pembangunan Gender atau IPG, digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Tabel 2.3.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Situbondo,
Kabupaten Sekitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019

Provinsi / Kabupaten	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
	2019	2018	2017	2016	2015
JAWA TIMUR	90.91	90.77	90.76	90.72	91.07
JEMBER	84.30	84.23	84.32	-	83.55
BANYUWANGI	86.81	86.44	86.20	-	86.01
BONDOWOSO	90.42	89.89	89.48	-	89.59
SITUBONDO	87.11	86.69	86.78	-	87.16
PROBOLINGGO	84.95	84.86	84.57	-	83.90
INDONESIA	91.07	90.99	90.96	90.82	91.03

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2015-2019

Capaian IPG Situbondo sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 menunjukkan perubahan yang cukup fluktuatif. Jika dibandingkan Jawa Timur dan Nasional, IPG Situbondo pada tahun 2019 menunjukkan kenaikan cukup signifikan dari tahun 2018 yaitu sebesar 0,42 poin. Namun capaian ini masih di bawah Jawa Timur dan nasional, dengan nilai IPG Jawa Timur sebesar 90,91 dan nasional 91,07.

Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, IPG Kabupaten Situbondo tahun 2019 masih lebih baik daripada Kabupaten Jember, Banyuwangi dan Probolinggo. Namun jika dilihat di tahun 2018, IPG Situbondo turun sebesar 0,09 poin dari tahun 2017, dan IPG tahun 2015 justru paling tinggi jika dibandingkan capaian 2017 sampai dengan 2019. Begitu juga dengan Jawa Timur, IPG tahun 2015 menunjukkan trend yang lebih tinggi jika dibandingkan tahun sesudahnya.

Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG, merupakan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Tabel 2.4.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Situbondo,
Kabupaten Sekitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019

Provinsi / Kabupaten	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
	2019	2018	2017	2016	2015
JAWA TIMUR	73.04	69.71	69.37	69.06	68.41
JEMBER	67.65	70.45	68.65	-	68.58
BANYUWANGI	74.52	69.71	69.43	-	67.58

Provinsi / Kabupaten	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
	2019	2018	2017	2016	2015
BONDOWOSO	65.10	59.55	57.28	-	55.82
SITUBONDO	69.26	67.72	65.04	-	65.07
PROBOLINGGO	68.22	67.06	64.86	-	65.47
INDONESIA	75.24	72.10	71.74	71.39	70.83

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2015-2019

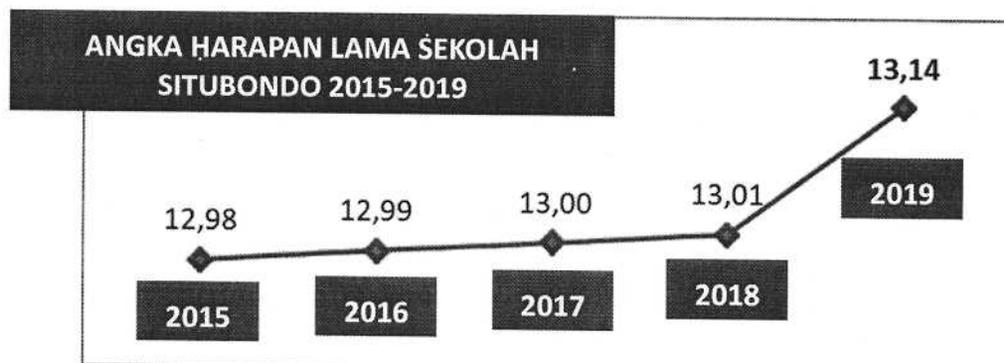
Dari tabel tersebut di atas tampak bahwa perkembangan IDG Kabupaten Situbondo tiap tahunnya menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, dari tahun 2018 ke tahun 2019 naik 1,54 poin atau naik sebesar 2,27 persen. Dan apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, capaian tahun 2019, Kabupaten Situbondo masih lebih tinggi daripada Kabupaten Jember, Bondowoso dan Probolinggo, namun masih dibawah Kabupaten Banyuwangi , Jawa Timur dan Nasional.

2.1. Aspek Pendidikan

2.1.1. Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah menunjukkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi bahwa peluang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Grafik 2.2.
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2019

Dari grafik tersebut di atas tampak bahwa pada angka harapan lama sekolah Kabupaten Situbondo mulai tahun 2015 hingga tahun 2019 naik cukup signifikan, mulai 12,98 sampai 13,14, atau naik sebesar 0,16 poin dari tahun 2015, atau naik sebesar 0,13 poin dari tahun 2018. Namun capaian kinerja ini masih rendah dari Jawa Timur dengan angka harapan lama sekolah 13,16.

Tabel 2.5.
Angka Harapan Lama Sekolah menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sekitar, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2015-2019

Provinsi/Kabupaten	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Jenis Kelamin (Tahun)									
	Perempuan					Laki-laki				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
JAWA TIMUR	13.15	13.07	13.03	12.78	12.60	13.23	13.22	13.21	13.20	12.72
Jember	12.90	12.89	12.63	-	11.85	13.56	13.35	12.88	-	12.50
Banyuwangi	12.87	12.78	12.77	-	12.36	12.72	12.65	12.64	-	12.04
Bondowoso	13.27	12.94	12.93	-	12.85	13.50	13.48	13.47	-	13.05
Situbondo	13.12	12.99	12.98	-	12.96	13.46	13.45	13.44	-	13.14
Probolinggo	12.13	11.86	11.74	-	11.72	12.63	12.35	12.34	-	12.32
INDONESIA	13.03	12.99	12.93	12.79	12.68	12.87	12.84	12.78	12.67	12.42

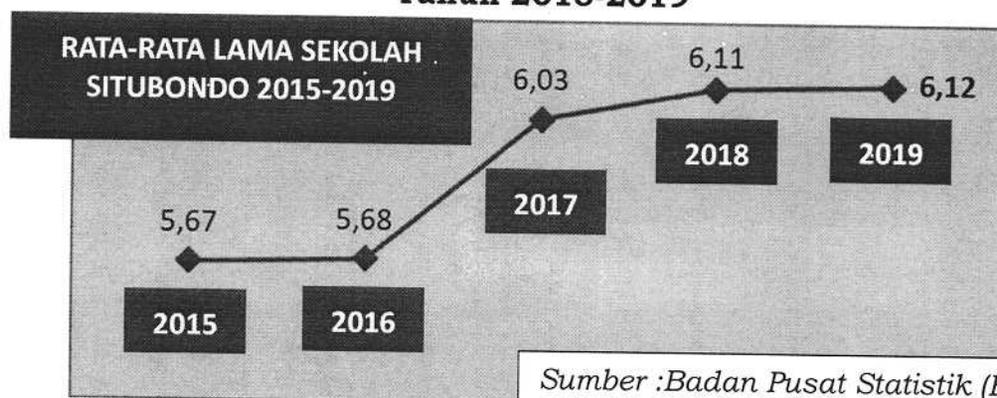
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2015-2019

Apabila dilihat dari tabel tersebut di atas, tampak bahwa angka Harapan Lama Sekolah menurut jenis kelamin di Kabupaten Situbondo sejak tahun 2015 sampai dengan 2019, perempuan berada di bawah laki-laki. Hal yang sama terjadi juga di Jawa Timur, Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Probolinggo. Namun berbanding terbalik dengan Kabupaten Banyuwangi dan nasional, dimana justru angka Harapan Lama Sekolah perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.

2.1.2. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ *Mean Years School* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Grafik 2.3.
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Situbondo
Tahun 2015-2019



Sebagaimana grafik tersebut tampak bahwa rata-rata lama sekolah mulai tahun 2015 ke tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari 5,67 hingga 6,12. Namun capaian ini masih rendah dari Provinsi Jawa Timur, dengan nilai rata-rata lama sekolah sebesar 7,59.

Tabel 2.6.
Rata-Rata Lama Sekolah menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sekitar, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2015-2019

Provinsi/Kabupaten	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Jenis Kelamin (Tahun)									
	Perempuan					Laki-laki				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
JAWA TIMUR	7.04	6.85	6.78	6.69	6.57	8.18	7.96	7.93	7.81	7.75
Jember	5.61	5.43	5.42	-	5.03	6.87	6.86	6.85	-	6.53
Banyuwangi	6.54	6.36	6.35	-	5.94	7.54	7.53	7.52	-	7.30
Bondowoso	4.99	4.96	4.66	-	4.49	6.54	6.38	6.37	-	6.35
Situbondo	5.44	5.43	5.42	-	5.09	6.93	6.92	6.80	-	6.35
Probolinggo	5.09	5.08	5.07	-	4.63	6.65	6.59	6.56	-	6.54
INDONESIA	7.89	7.72	7.65	7.50	7.35	8.81	8.62	8.56	8.41	8.35

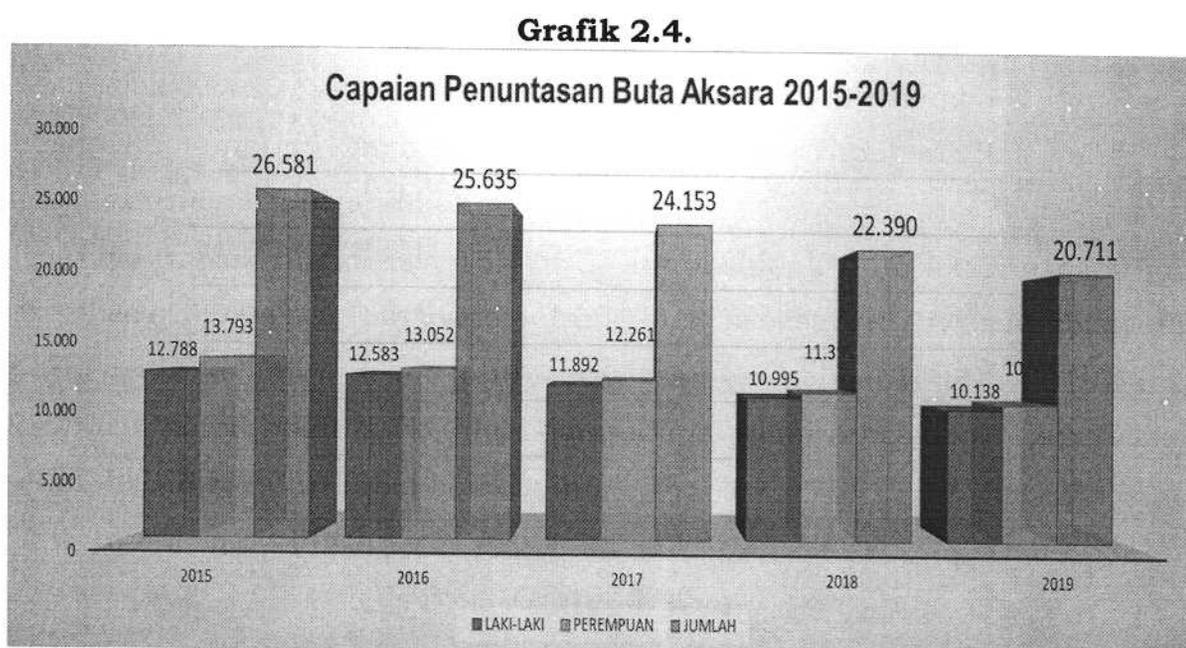
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2015-2019

Rata-rata Lama Sekolah menurut jenis kelamin di Situbondo, perempuan di bawah laki-laki dengan perbedaan yang cukup signifikan, seperti di tahun 2018 dan 2019 sebesar 1,49 poin, dan tahun 2017 sebesar 1,38 poin. Kecenderungan hal yang sama terjadi juga di kabupaten sekitar, Jawa Timur dan nasional.

2.1.3. Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan ukuran persentase penduduk pada kelompok usia tertentu yang dapat membaca sekaligus menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji dan lain-lain) terhadap seluruh penduduk pada kelompok usia tersebut. Angka melek huruf menjadi indikator dari kemampuan membaca dan menulis (literasi). Kemampuan membaca dan menulis merupakan hal yang paling mendasar dari suatu pendidikan.

Angka melek huruf usia 15 s/d 59 tahun (tidak buta aksara) pada tahun 2019 sebesar 93,94% , dan pada tahun 2018 sebesar 95,16%. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, tingkat melek huruf perempuan lebih tinggi daripada laki-laki sebesar 51,12 persen. Hal tersebut tergambar dari tabel berikut ini.

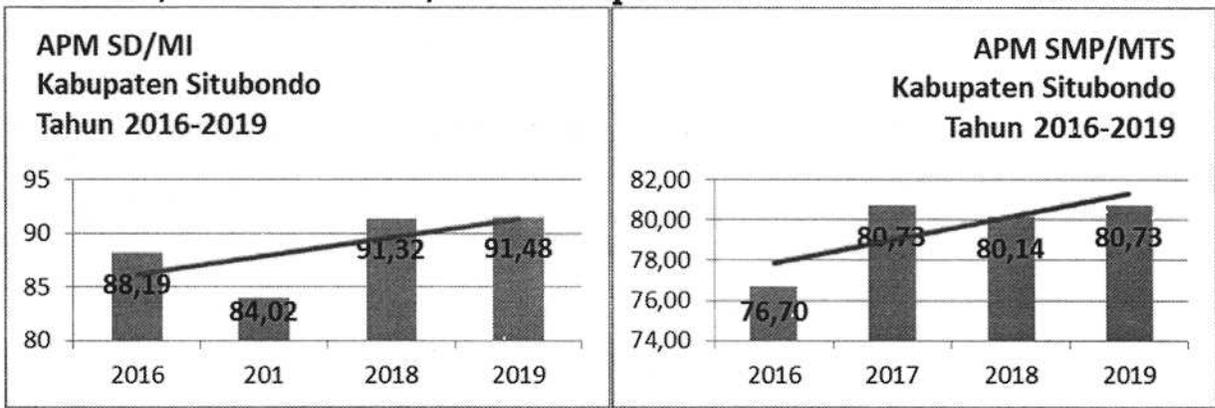


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo 2019

2.1.4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Grafik 2.5.
APM SD/MI & APM SMP/MTS Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo 2019

2.1.4.1. APM SD / MI

Angka Partisipasi Murni SD/MI atau APM SD/MI Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 sebesar 91,48%, dengan jumlah siswa SDN Negeri/Swasta, MI Negeri/Swasta dan Paket A usia 7-12 tahun sebanyak 61.117, sedangkan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 66.809.

Apabila dilihat dari jenis kelamin, Angka Partisipasi Murni Perempuan SD/MI tahun 2019 atau APM Perempuan SD/MI sebesar 104,29%, dengan jumlah siswa perempuan SD Negeri/Swasta dan MI Negeri/Swasta usia 7-12 tahun sebanyak 33.823, sementara jumlah penduduk perempuan usia 7-12 tahun sebanyak 32.432.

Sedangkan Angka Partisipasi Murni Laki-Laki SD/MI tahun 2019 atau APM Laki-laki SD/MI sebesar 79,39%, dengan jumlah siswa laki-laki SD Negeri/Swasta dan MI Negeri/Swasta usia 7-12 tahun sebanyak 27.293, dari jumlah penduduk laki-laki usia 7-12 tahun sebanyak 34.377.

Dari APM Perempuan dan APM Laki-laki SD/MI tahun 2019 tersebut diatas, didapatkan perbandingan bahwa partisipasi keterlibatan siswa perempuan dalam pendidikan tingkat SD/MI lebih tinggi daripada keterlibatan siswa laki-laki.

sedangkan APM SD/MI Tahun 2018 sebesar 91,32%, dengan jumlah SDN Negeri/Swasta, MI Negeri/Swasta dan Paket A usia 7-12 tahun sebanyak 51.191, dan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 56.059.

2.1.4.2. APM SMP / MTS

Angka Partisipasi Murni SMP/MTS atau APM SMP/MTS Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 sebesar 80,73%, dengan jumlah siswa SMP Negeri/Swasta, MTS Negeri/Swasta dan Paket B usia 13-15 tahun sebanyak 24.855, sedangkan jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 30.785.

Angka Partisipasi Murni Perempuan SMP/MTS tahun 2019 atau APM Perempuan SMP/MTS sebesar 81,79%, dengan jumlah siswa perempuan SMP Negeri/Swasta dan MTS Negeri/Swasta usia 13-15 tahun sebanyak 12.253, sementara jumlah penduduk perempuan usia 7-12 tahun sebanyak 14.981.

Sedangkan Angka Partisipasi Murni Laki-Laki SMP/MTS tahun 2019 atau APM Laki-laki SMP/MTS sebesar 79,73%, dengan jumlah siswa laki-laki SD Negeri/Swasta dan MI Negeri/Swasta usia 13-15 tahun sebanyak 12.602, dari jumlah penduduk laki-laki usia 13-15 tahun sebanyak 15.805.

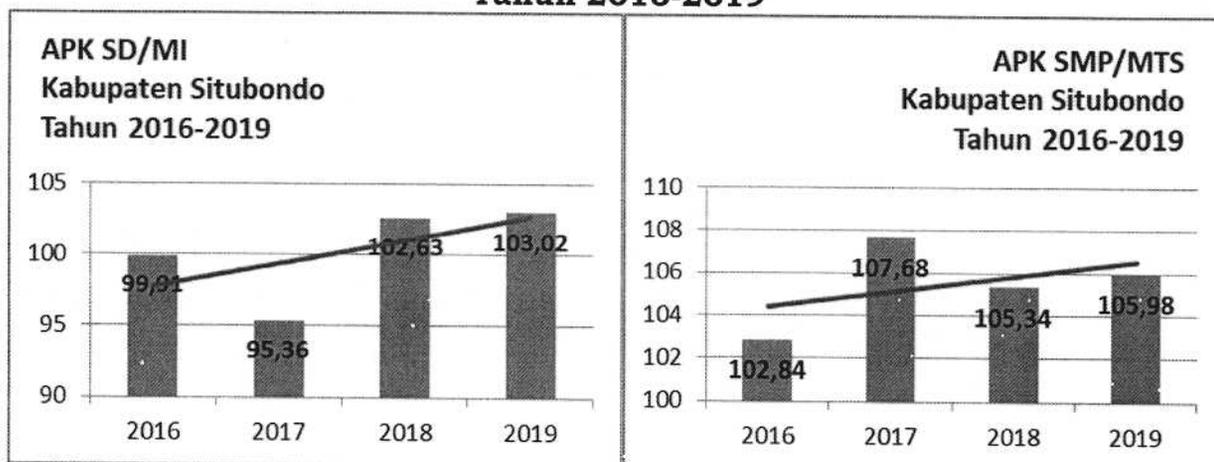
Seperti halnya APM SD/MI, dari APM Perempuan dan APM Laki-laki SMP/MTS tahun 2019 tersebut diatas, didapatkan perbandingan bahwa partisipasi keterlibatan siswa perempuan dalam pendidikan tingkat SD/MI lebih tinggi daripada keterlibatan siswa laki-laki.

APM SMP/MTS tahun 2018 sebesar 80,14%, dengan jumlah siswa SMP Negeri/Swasta, MTS Negeri/Swasta dan Paket B usia 13-15 tahun sebanyak 24.125, dan jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 30.014.

2.1.5. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Indikator ini digunakan untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka partisipasi kasar dapat memberikan gambaran tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu.

Grafik 2.6.
APK SD/MI & APK SMP/MTS Kabupaten Situbondo
Tahun 2016-2019



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo 2019

2.1.5.1. APK SD / MI

Angka Partisipasi Kasar SD/MI atau APK SD/MI Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 sebesar 103,02%, dengan jumlah siswa SD Negeri/Swasta, MI Negeri/Swasta dan Paket A sebanyak 68.825, sementara jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 66.809.

Sedangkan APK SD/MI tahun 2018 sebesar 102,63% dengan siswa SD/MI sebanyak 57.536, dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 56.059.

2.1.5.2. APK SMP / MTS

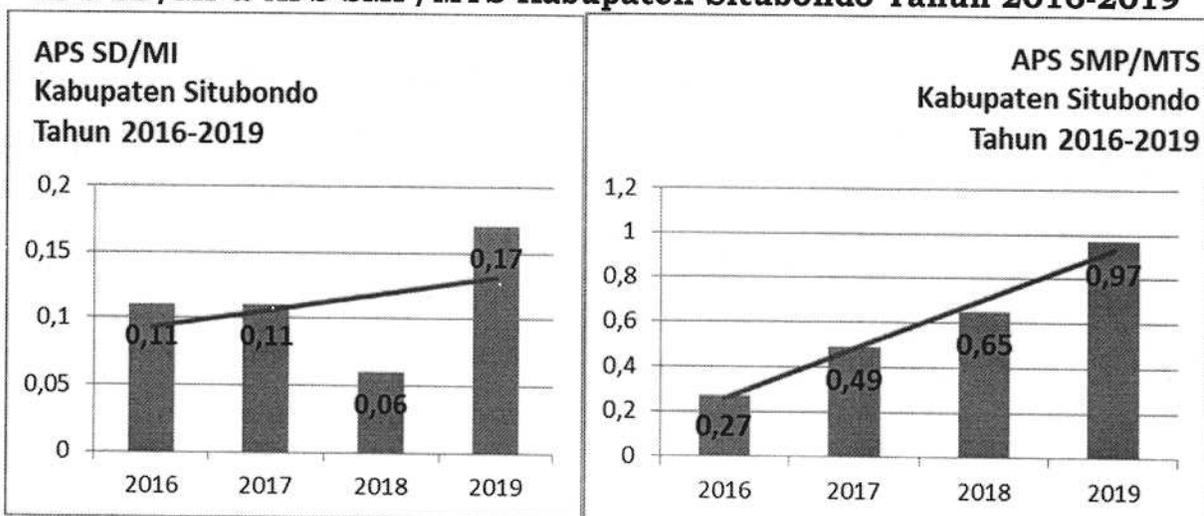
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS atau APK SMP/MTS Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 sebesar 105,98%, dengan jumlah siswa SMP Negeri/Swasta, MTS Negeri/Swasta dan Paket B sebanyak 32.626 , sementara jumlah penduduk usia 3-15 tahun sebanyak 30.785.

Untuk tahun 2018, APK SMP/MTS masih sebesar 105,34% dengan jumlah siswa SMP/MTS sebanyak 31.712 dari jumlah penduduk usia 12-15 tahun sejumlah 30.104.

2.1.6. Angka Putus Sekolah (APS)

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen.

Grafik 2.7.
APS SD/MI & APS SMP/MTS Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo 2019

2.1.6.1. APS SD / MI

Angka Putus Sekolah SD/MI atau APS SD/MI Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 sebesar 0,01%, dengan jumlah siswa yang putus sekolah SD Negeri/Swasta, MI Negeri/Swasta dan Paket A sebanyak 4 siswa putus sekolah, dari jumlah siswa SD/MI sebanyak 68.825. Sedangkan untuk tahun 2018, APS SD/MI sebesar 0,06%. Semakin kecil angka APS, maka semakin kecil presentase angka putus sekolah.

2.1.6.2. APS SMP / MTS

Angka Putus Sekolah SMP/MTS atau APS SMP/MTS Kabupaten Situbondo tahun 2019 sebesar 0.97%, dengan jumlah siswa yang putus sekolah SMP/MTS Negeri/Swasta, MI Negeri/Swasta dan Paket B sebanyak 316 siswa putus sekolah, dari jumlah siswa SMP/MTS sebanyak 32.626. Untuk tahun 2018, APS SMP/MTS sebesar 0,65%.

2.1.7. Pernikahan Usia Dini

Salah satu penyebab Angka Putus Sekolah cukup tinggi di Kabupaten Situbondo dikarenakan angka pernikahan usia dini yang masih cukup tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 7 disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, ketentuan Pasal 7 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirubah menjadi “Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Tabel 2.7.
Jumlah Penduduk Pernikahan Usia Dini menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019

NO	KECAMATAN	2016			2017			2018			2019		
		L	P	JUM									
1	SITUBONDO	1	0	1	0	0	0	1	0	1	6	7	13
2	PANJI	2	0	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0
3	MANGARAN	1	3	4	5	5	10	2	2	4	2	0	2
4	KAPONGAN	1	0	1	1	1	2	1	0	1	1	0	1
5	ARJASA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	3
6	JANGKAR	1	0	1	0	0	0	4	1	5	0	0	0

7	ASEMBAGUS	1	1	2	1	1	2	0	3	3	0	0	0
8	BANYUPUTIH	2	1	3	3	7	10	5	20	25	1	3	4
9	PANARUKAN	3	1	4	1	1	2	3	5	8	79	0	79
10	KENDIT	2	2	4	3	0	3	1	1	2	1	2	3
11	MLANDINGAN	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	2	4
12	SUBOH	1	0	1	3	0	3	0	58	58	2	2	4
13	BESUKI	4	2	6	0	0	0	4	1	5	3	2	5
14	JATIBANTENG	1	1	2	2	0	2	0	0	0	10	1	11
15	SUMBERMALANG	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2
16	BUNGATAN	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
17	BANYUGLUGUR	1	1	2	1	0	1	0	3	3	1	0	1
J U M L A H		23	12	35	22	15	37	23	95	118	113	20	133

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo 2016-2019

Dari data tersebut di atas tampak bahwa prosentase pernikahan usia dini perempuan tahun 2019 sebanyak 20 orang atau 15 persen dari jumlah pernikahan usia dini, tahun 2018 sebanyak 95 orang atau 80,5 persen, tahun 2017 sebanyak 15 orang atau 40,54 persen, dan tahun 2016 sebanyak 12 orang atau 34,29 orang.

Apabila dibandingkan dengan total jumlah pernikahan, prosentase pernikahan usia dini tahun 2019 sebesar 2,31 persen dari 5757 total jumlah pernikahan, dan tahun 2018 sebesar 2,07 persen dari 5695 total jumlah pernikahan.

2.1.8. Rasio Ketersediaan Guru dan Murid

Tabel 2.8.
Rasio Ketersediaan Guru dan Murid Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2019

GURU					
TK		SD		SMP	
Negeri/ Swasta	RA	Negeri/ Swasta	MI	Negeri/ Swasta	MTS
949	418	5267	976	1504	1256
1367		6243		2760	
MURID					
TK		SD		SMP	
Negeri/ Swasta	RA	Negeri/ Swasta	MI	Negeri/ Swasta	MTS
11106	5642	48275	8578	21265	11082
16748		56853		32347	

Sumber : Bada Pusat Statistik (BPS) 2019

Berdasarkan tabel tersebut di atas, tampak bahwa jumlah guru TK Negeri/Swasta dan RA sebanyak 1367 guru, sedangkan jumlah murid TK Negeri/Swasta dan RA sebanyak 16748 murid, sehingga rata-rata tiap guru menangani 12-13 murid.

Untuk angka beban guru SD dan MI, dari jumlah guru SD Negeri/Swasta dan MI sebanyak 6243 guru, dan jumlah murid SD Negeri/Swasta dan MI sebanyak 56853 murid, didapatkan rata-rata tiap guru menangani 9-10 murid.

Sementara untuk jumlah guru SMP/MTS dan MI sebanyak 2760 guru, sedangkan jumlah murid SMP Negeri/Swasta dan MI sebanyak 56853 murid, didapatkan rata-rata tiap guru menangani 11-12 murid.

2.1.9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi

Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, ditandai dengan adanya sertifikat / ijazah. Tingkat pendidikan SD, meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat. Tingkat pendidikan SMP, meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan sederajat. Tingkat Pendidikan SM, meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat. Tingkat pendidikan PT, meliputi jenjang pendidikan Diploma I, II, III, dan IV dan sederajat.

Tabel 2.9.a.
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan menurut Jenis Kelamin Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2017

TINGKAT PENDIDIKAN	TH 2016				TH 2017			
	LK	PR	JUMLAH	%	LK	PR	JUMLAH	%
Tidak/Belum Sekolah	102,150	123,747	225,897	33,30%	106,692	128,343	235,035	34,29%
Belum tamat SD/sederajat	23,923	23,410	47,333	6,98%	25,211	24,439	49,650	7,24%
Tamat SD/Sederajat	104,164	114,561	218,725	32,25%	100,720	111,546	212,266	30,97%
SLTP/Sederajat	40,346	37,699	78,045	11,51%	40,032	37,765	77,797	11,35%
SLTA/Sederajat	50,370	34,431	84,801	12,50%	50,651	35,194	85,845	12,52%
Diploma I/II	930	1,022	1,952	0,29%	904	1,013	1,917	0,28%
Diploma III	1,251	1,600	2,851	0,42%	1,291	1,711	3,002	0,44%
S1/Diploma IV	9,895	7,887	17,782	2,62%	10,420	8,530	18,950	2,76%
S2	631	223	854	0,13%	644	236	880	0,13%
S3	27	31	58	0,01%	36	37	73	0,01%
Jumlah	333,687	344,611	678,298		336,601	348,814	615,415	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo 2019

Tabel 2.9.b.
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2019

TINGKAT PENDIDIKAN	TH 2018				TH 2019			
	LK	PR	JUMLAH	%	LK	PR	JUMLAH	%
Tidak/Belum Sekolah	108,686	130,103	238,789	34,68%	111,056	131,752	242,808	35,11%
Belum tamat SD/ sederajat	26,583	25,480	52,063	7,56%	27,232	25,793	53,025	7,67%
Tamat SD/ Sederajat	97,865	107,733	205,598	29,86%	97,222	106,951	204,173	29,52%
SLTP/ Sederajat	39,871	37,629	77,500	11,26%	39,415	36,964	76,379	11,04%
SLTA/ Sederajat	51,374	36,433	88	12,75%	51,233	36,381	87,614	11,67%
Diploma I/II	913	1,000	1,913	0,28%	889	988	1,877	0,27%
Diploma III	1,322	1,861	3,183	0,46%	1,334	1,882	3,216.0	0,46%
S1/ Diploma IV	11,133	9,482	20,615	2,99%	11,472	9,982	21,454	3,10%
S2	675	274	949	0,14%	712	298	1.010	0,15%
S3	37	35	72	0,01%	34	32	66	0,01%
Jumlah	338,459	350,030	688,489		340,599	351,023	691,622	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo 2019

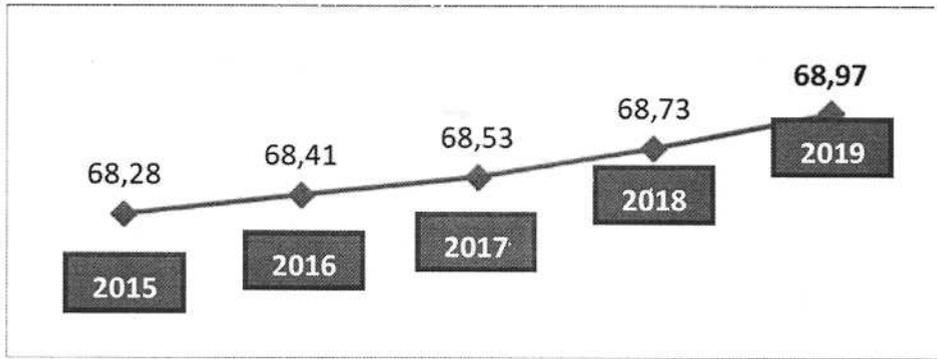
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk perempuan Kabupaten Situbondo lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Jika dilihat dari trend tingkat pendidikan yang diselesaikan pada tahun 2016 sampai dengan 2019, jumlah perempuan lebih tinggi di tingkat SD, Diploma I/II, dan Diploma III. Sedangkan jumlah perempuan lebih rendah di tingkat pendidikan SLTP, SLTA, S1/ Diploma IV, S2 dan S3.

2.2. Aspek Kesehatan

2.2.1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Grafik 2.9.
Angka Harapan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2019

Dari grafik tersebut di atas tampak bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Situbondo naik secara konsisten setiap tahunnya. AHH tahun 2019 naik sebesar 0,35 persen, atau naik sebesar 0,24 poin dari tahun 2018. Sedangkan AHH tahun 2018 naik sebesar 0,29 persen, atau naik sebesar 0,2 poin dari tahun 2017.

Tabel 2.10.
Angka Harapan Hidup (AHH) menurut Jenis Kelamin Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sekitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019

Provinsi / Kabupaten	Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Jenis Kelamin (Tahun)									
	Perempuan					Laki-laki				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
JAWA TIMUR	73.15	72.87	72.70	72.68	72.67	69.30	68.99	68.82	68.80	68.79
Jember	70.91	70.66	70.46	-	69.42	66.96	66.70	66.50	-	65.67
Banyuwangi	72.45	72.24	72.10	-	71.29	68.52	68.33	68.17	-	67.45
Bondowoso	68.45	68.17	67.93	-	66.91	64.54	64.27	64.05	-	63.25
Situbondo	70.89	70.66	70.46	-	69.51	66.94	66.68	66.49	-	65.75
Probolinggo	68.90	68.60	68.36	-	67.32	64.98	64.69	64.46	-	63.64
INDONESIA	73.33	73.19	73.06	72.80	72.78	69.44	69.30	69.16	69.09	68.93

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2015-2019

Apabila dilihat dari tabel diatas, AHH dilihat menurut jenis kelamin tampak bahwa prosentase AHH perempuan Kabupaten Situbondo dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, lebih tinggi daripada prosentase AHH laki-laki Kabupaten Situbondo. Hal ini menandakan bahwa perempuan memiliki lebih banyak tahun untuk hidup semenjak lahir, dibandingkan laki-laki. Hal yang sama terjadi juga di kabupaten sekitar, Jawa Timur dan nasional.

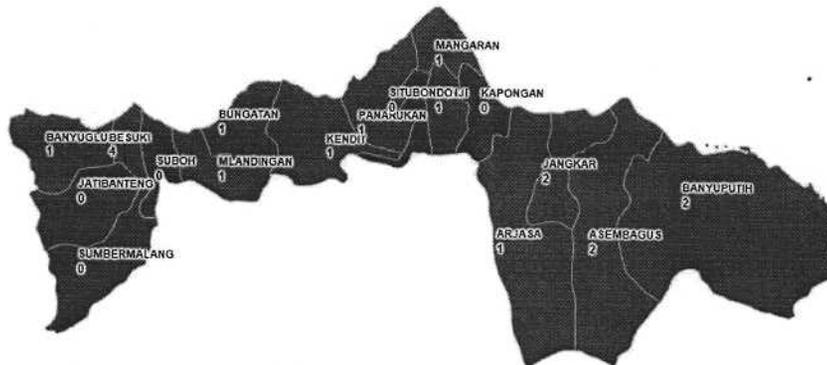
2.2.2. Angka Kematian Ibu (AKI)

AKI merupakan indikator keberhasilan pembangunan daerah dan juga digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian

seorang ibu yang disebabkan oleh kehamilan, melahirkan atau nifas, bukan karena kecelakaan. Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung per 100.000 kelahiran hidup (kh).

Berdasarkan Laporan Kematian Ibu dari Puskesmas se-Kabupaten Situbondo tahun 2019 jumlah kematian ibu adalah 18 kasus dengan masa kematian pada masa hamil 38,9% (7 kasus), masa persalinan sebesar 11,1% (2 kasus) dan masa nifas 50% (9 kasus). Sedangkan komposisi kematian ibu terbanyak berdasarkan kelompok usia adalah pada usia produktif secara seksual (20-34 tahun), yakni sebesar 77,8% (14 kasus).

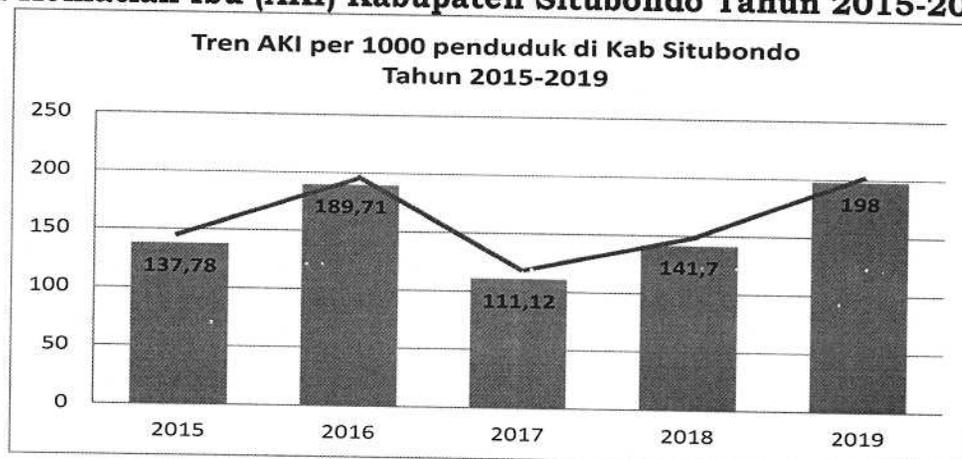
Gambar 2.1.
Sebaran Kematian Ibu Di Kabupaten Situbondo Tahun 2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Dari gambar tersebut di atas tampak bahwa sebanyak 12 kecamatan memiliki kasus kematian ibu dengan kasus terbanyak. Paling tinggi adalah Kecamatan Besuki sebanyak 4 kasus. Apabila dibandingkan tahun 2018, AKI tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 56,3 poin, dengan penambahan kasus kematian dari 13 kematian pada tahun 2018 menjadi 18 kematian di tahun 2019.

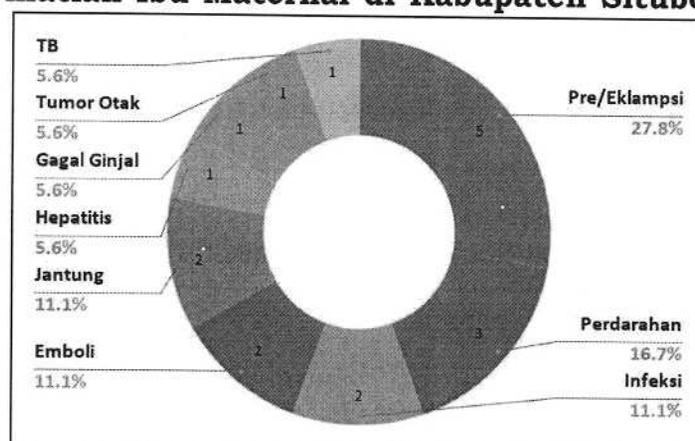
Grafik 2.10.
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Adapun penyebab kematian langsung ibu maternal di Kabupaten Situbondo tahun 2019, dapat terlihat dari grafik berikut ini :

Grafik 2.11.
Penyebab Kematian Ibu Maternal di Kabupaten Situbondo Tahun 2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo tahun 2019

Dalam Penurunan Angka Kematian Ibu sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan Ibu Hamil (Bumil K4), Penanganan komplikasi kebidanan, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten, dan Kualitas pelayanan Ibu Nifas.

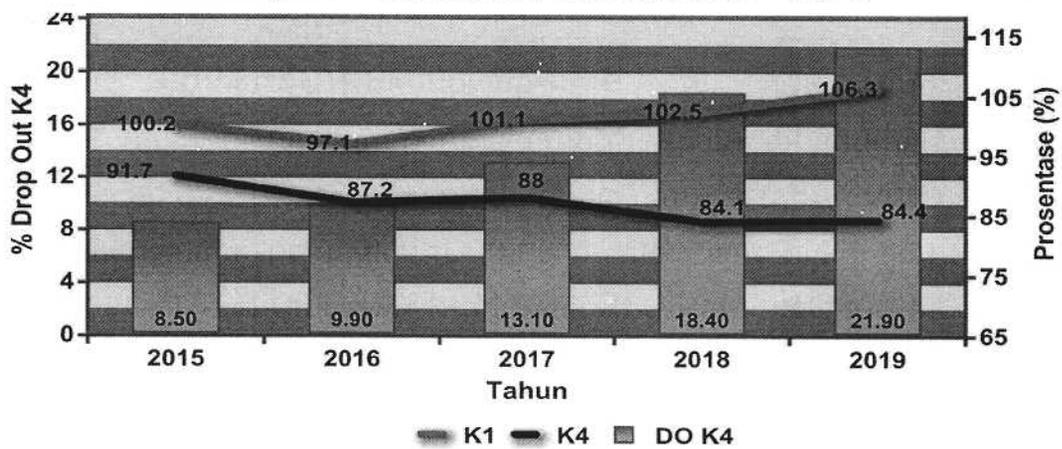
2.2.3. Cakupan Pelayanan Ibu Hamil K1 dan K4

K1 atau juga disebut akses pelayanan ibu hamil merupakan gambaran besaran ibu hamil yang telah melakukan kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal. Sedangkan K4 adalah gambaran besaran ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai dengan standar serta paling sedikit empat kali kunjungan, dengan distribusi sekali pada trimester pertama, sekali pada trimester dua dan dua kali

pada trimester ke tiga. Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kualitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan merupakan salah satu jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan berdasarkan Permenkes No 4 Tahun 2019 yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian cakupan K1 Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 adalah 106,3% dan kembali mengalami peningkatan (3,8 poin) dibandingkan tahun 2018 yang hanya mencapai 102,5%. Sedangkan capaian K4 tahun 2019 adalah 84,4% dan sedikit mengalami peningkatan (0,03 poin) dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 84,1%. Trend Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1, K4 dan Drop Out K4 Kabupaten Situbondo Tahun 2015 – 2019 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.12.
Trend Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1, K4 dan Drop Out K4
Kabupaten Situbondo Tahun 2015 – 2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo tahun 2019

Grafik di atas juga menggambarkan bahwa Angka Drop Out K4 selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan dan sudah di atas angka toleransi yang diperbolehkan, yakni sebesar 5%. Drop Out K4 tahun 2019 sebesar 21,90% dan merupakan drop out tertinggi selama lima tahun terakhir. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena sebenarnya sudah banyak ibu hamil yang akses dengan fasilitas kesehatan namun masih belum mendapatkan pelayanan sesuai standar dikarenakan sebagian ibu hamil akses pertama kali dengan petugas kesehatan pada kehamilan > 12 mgg serta banyaknya kasus BBLR (31,6%).

Hal ini berarti bahwa masih perlu adanya peningkatan kinerja untuk meningkatkan capaian target yang telah ditetapkan dengan strategi sbb:

- a. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan sedini mungkin;

- b. Meningkatkan pemberdayaan Satgas Gerdu Penakib Desa dan Kecamatan dalam cakupan K1 murni melalui koordinasi dengan kader dan masyarakat;
- c. Peningkatan kinerja bidan penanggung jawab wilayah dalam melakukan tindak lanjut pada Ibu Hamil yg sudah akses Trimester 1;
- d. Meningkatkan kepatuhan petugas dalam memberikan pelayanan ANC sesuai standart;
- e. Pemenuhan standart pelayanan ibu hamil 10 T di Puskesmas dengan pengadaan reagen darah lengkap, stick pemeriksaan Hb, Hematokrit dan Glukosa serta protein sesuai dengan jumlah sasaran ibu hamil agar ibu hamil mendapatkan pemeriksaan laboratorium secara gratis;
- f. Menurunkan angka kejadian abortus dan persalinan Prematur melalui perbaikan status gizi ibu hamil dengan memberikan PMT pada ibu hamil, terutama pada ibu hamil yang kenaikan berat badannya kurang, ibu hamil dengan KEK dan ibu hamil anemia.

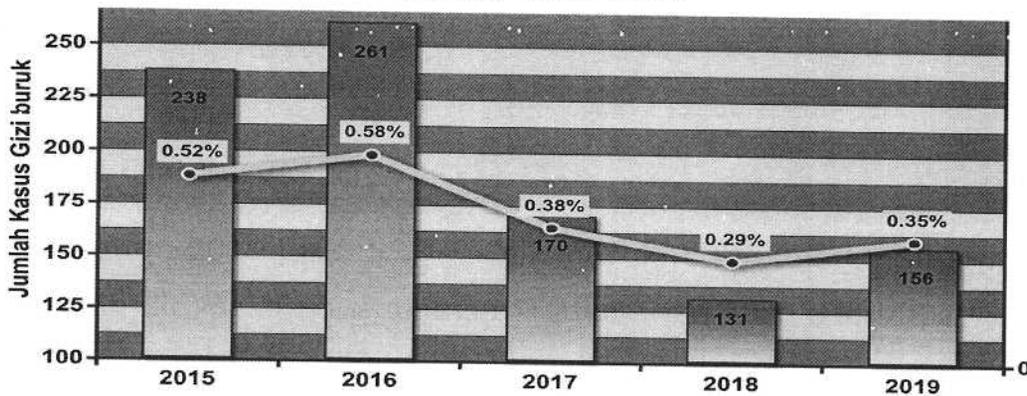
2.2.4. Pelayanan Komplikasi Kebidanan

Pengertian penanganan komplikasi kebidanan adalah ibu dengan komplikasi kebidanan yang ditangani secara definitif (sampai selesai) di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Komplikasi yang mengancam jiwa ibu antara lain : abortus, hiperemesis gravidarium, perdarahan per vagina, hipertensi dalam kehamilan, kehamilan lewat waktu, ketuban pecah dini, kelainan letak/presentasi janin, partus macet/distosia, infeksi berat, sepsis, kontraksi dini/persalinan prematur, kehamilan ganda dan kasus non obsteri. Jumlah komplikasi kebidanan diperkirakan sebesar 20% dari jumlah ibu hamil yang ada. Pelayanan komplikasi kebidanan di Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 sebesar 118% dan mengalami peningkatan (1,6 poin) dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 116,4%. Grafik berikut trend komplikasi kebidanan ditangani.

2.2.7. Balita Gizi Buruk

Pada tahun 2019 jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Situbondo tercatat sebanyak 156 kasus. Perkembangan Balita Gizi Buruk Kabupaten Situbondo Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2.17.
Perkembangan Kasus Gizi Buruk Kabupaten Situbondo
Tahun 2015-2019

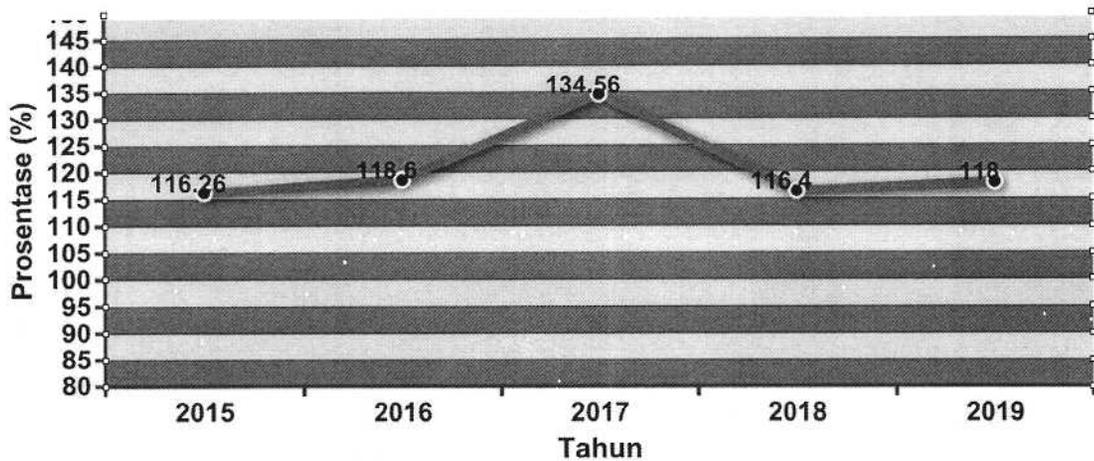


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Grafik tersebut menunjukkan bahwa kasus gizi buruk di Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan ditahun 2019 yakni dari 131 kasus pada tahun 2018 (0,29%) menjadi 156 kasus (0,35%) pada tahun 2019. Dari kasus gizi buruk yang ditemukan hampir semua adalah dengan penyakit penyerta. Kenaikan jumlah kasus tersebut disebabkan semakin gencarnya petugas gizi untuk menemukan secara dini kasus gizi buruk di lapangan. Dengan ditemukannya secara dini kasus-kasus gizi buruk akan memudahkan petugas untuk melakukan intervensi secara langsung, sehingga diharapkan dalam waktu satu atau dua tahun ke depan jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Situbondo sudah mulai menurun lagi.

Penyebab utama terjadinya gizi buruk pada Balita di Kabupaten Situbondo tahun 2019 adalah pengetahuan ibu/keluarga yang masih rendah, yakni sebanyak 82 kasus (50,00%), penyebab terbesar kedua adalah sakit sebanyak 31 kasus (18,90%), kemudian yang ketiga penyebab kemiskinan sebanyak 23 kasus (14,02%), penyebab keempat BBLR sebanyak 17 kasus (10,36%) dan yang terakhir penyebab lain-lain sebanyak 11 kasus (6,70%). Sebelumnya di tahun 2018 pengetahuan ibu/keluarga juga menjadi penyebab utama kejadian gizi buruk, yakni 38,73% atau sebanyak 55 kasus. Penyebab kasus gizi buruk di Kabupaten Situbondo tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2.13.
Cakupan Komplikasi Kebidanan Ditangani Di Kabupaten Situbondo
Tahun 2015 s/d 2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo tahun 2019

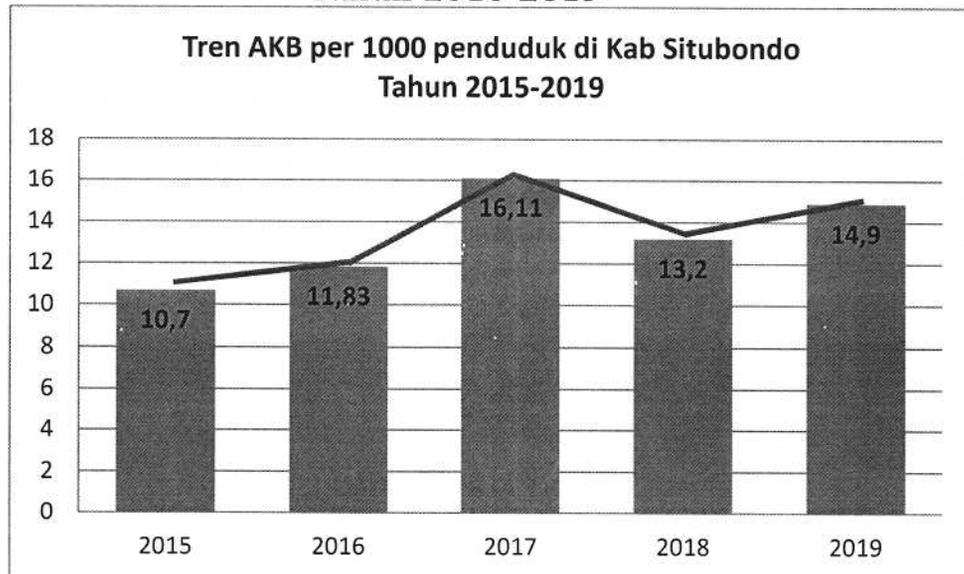
2.2.5. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat bayi lahir sampai satu hari sebelum ulang tahun pertama. Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per

1.000 kelahiran hidup (KH). AKB dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok usia yang paling rentan terkena dampak dari perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi. Indikator AKB terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial-ekonomi, lingkungan tempat tinggal dan kesehatannya.

Total kematian bayi Kabupaten Situbondo Tahun 2019 sebanyak 136 kasus dari 9091 kelahiran hidup, sehingga angka kematian bayi tahun 2019 adalah 14,9 per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian bayi terbanyak ada di Puskesmas Asembagus dan Arjasa, yakni masing-masing sebanyak 15 bayi dan kematian bayi terendah di Puskesmas Wonorejo yang hanya memiliki 1 (satu) kematian bayi. AKB Kabupaten Situbondo tahun 2019 mengalami peningkatan 1,7 point dibandingkan tahun 2018, yakni dari 13,2 / 1000 KH pada tahun 2018 (121 kematian bayi) menjadi 14,9 pada tahun 2019 (136 kematian bayi).

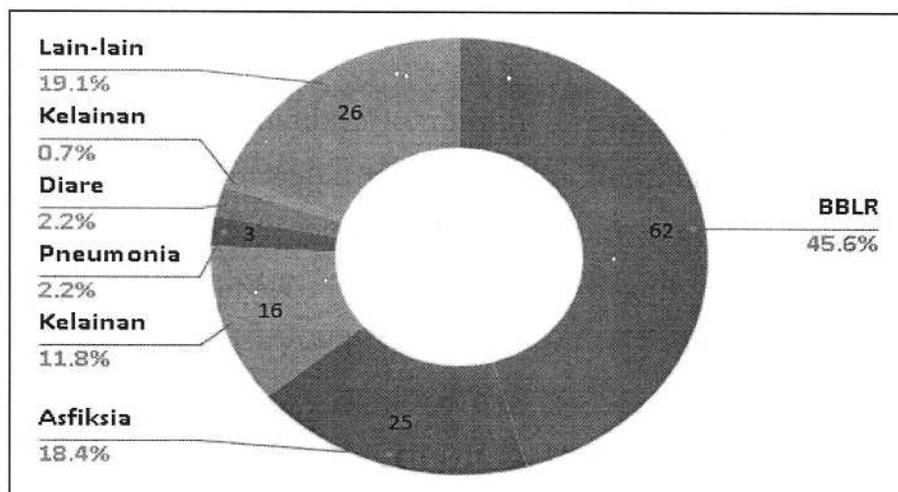
Grafik 2.14.
Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Situbondo
Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2019

BBLR masih menjadi penyebab kematian tertinggi pada bayi di Kabupaten Situbondo tahun 2019, yakni sebanyak 62 kasus kematian atau 45,6%. Asfiksia menduduki peringkat kedua penyebab kematian bayi tahun 2019 yakni sebanyak 25 kasus atau sebesar 18,4%. Penyebab kematian bayi di Kabupaten Situbondo tahun 2019 terlihat pada Grafik berikut :

Grafik 2.15.
Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Situbondo
Tahun 2019



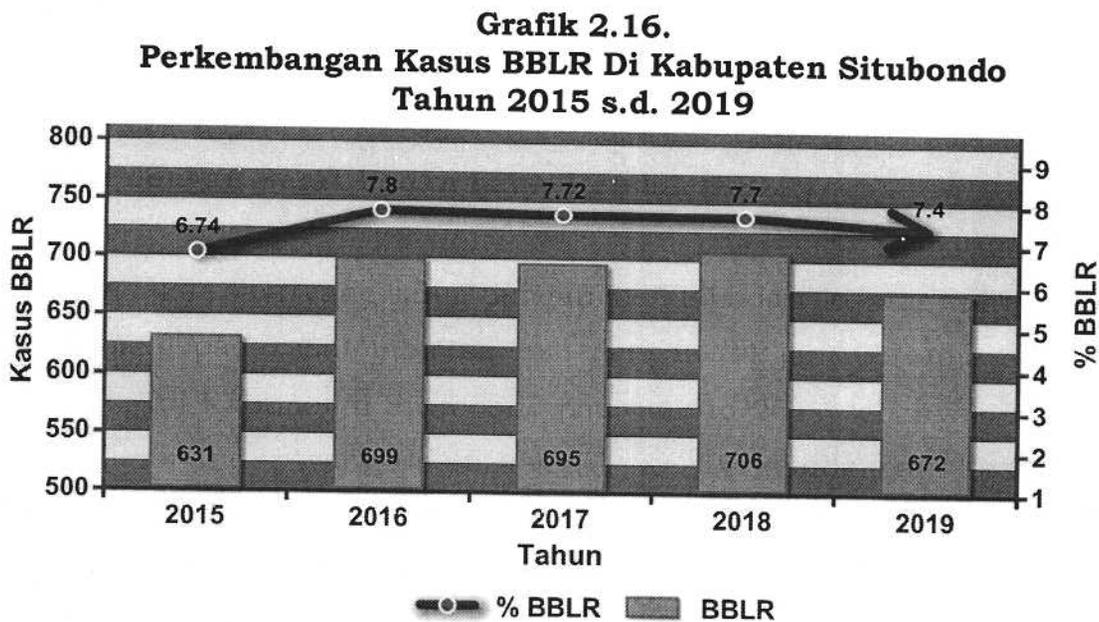
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Dukungan dan partisipasi bidan dalam melakukan penapisan dan deteksi resiko tinggi sangat diperlukan sehingga ibu hamil dengan resiko tinggi/komplikasi yang berpotensi melahirkan bayi dengan komplikasi mendapat penanganan kesehatan di fasilitas yang memadai sehingga kematian bayi dapat diminimalkan. Selain itu, adanya program pelatihan-pelatihan yang menunjang

upaya penurunan kematian bayi seperti pelatihan manajemen Asfiksia, pelatihan standarisasi BBLR, Pelatihan Kelas ibu balita dan peningkatan SDM ibu hamil juga turut mendukung penekanan AKB.

2.2.6. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

BBLR adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram, yang ditimbang pada saat lahir sampai dengan 24 jam pertama setelah lahir. Jumlah BBLR di Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 sebanyak 672 bayi dari 9.091 bayi lahir hidup yang dilahirkan (7,4%). Perkembangan Kasus BBLR di Kabupaten Situbondo selama lima terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2019

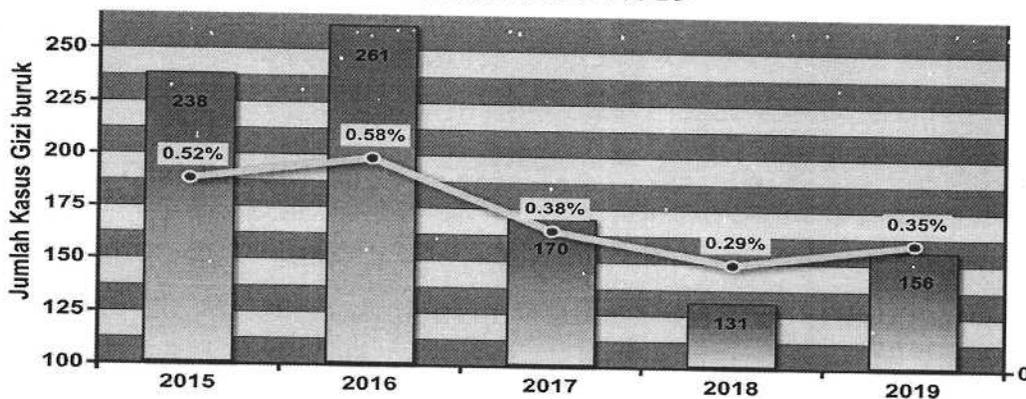
Selama empat tahun terakhir kasus BBLR di Kabupaten Situbondo cenderung mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan, yakni dari 7,8% (699 kasus) tahun 2016 menjadi 7,72% tahun 2017 (695 kasus), tahun 2018 kembali menurun menjadi 7,70% (706 kasus) dan tahun 2019 menjadi 7,4% (672 kasus).

Penanganan kasus BBLR perlu mendapat perhatian lebih mengingat dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan bayi, gizi buruk dan bahkan berujung pada kematian bayi. Pada tahun 2019 BBLR masih menjadi penyebab kematian tertinggi pada bayi di Kabupaten Situbondo, yakni sebanyak 62 kasus kematian atau 45,6%. Besarnya kematian karena BBLR banyak disebabkan karena ANC yang kurang berkualitas serta kompetensi petugas dalam manajemen BBLR yang masih kurang.

2.2.7. Balita Gizi Buruk

Pada tahun 2019 jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Situbondo tercatat sebanyak 156 kasus. Perkembangan Balita Gizi Buruk Kabupaten Situbondo Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2.17.
Perkembangan Kasus Gizi Buruk Kabupaten Situbondo
Tahun 2015-2019

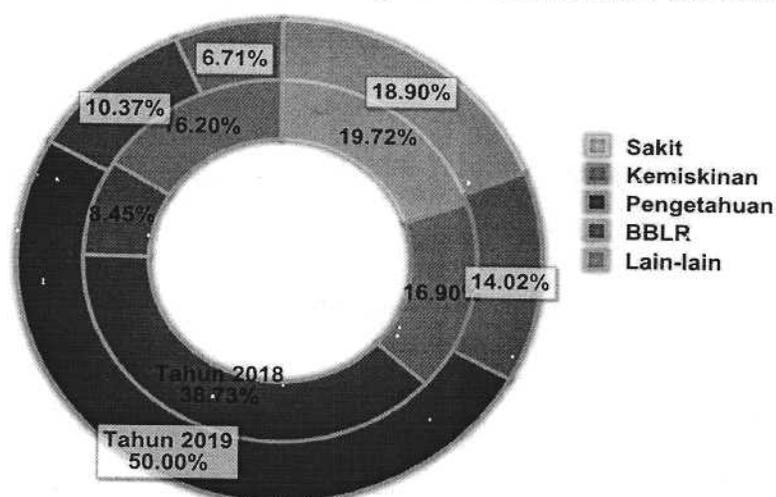


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Grafik tersebut menunjukkan bahwa kasus gizi buruk di Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan ditahun 2019 yakni dari 131 kasus pada tahun 2018 (0,29%) menjadi 156 kasus (0,35%) pada tahun 2019. Dari kasus gizi buruk yang ditemukan hampir semua adalah dengan penyakit penyerta. Kenaikan jumlah kasus tersebut disebabkan semakin gencarnya petugas gizi untuk menemukan secara dini kasus gizi buruk di lapangan. Dengan ditemukannya secara dini kasus-kasus gizi buruk akan memudahkan petugas untuk melakukan intervensi secara langsung, sehingga diharapkan dalam waktu satu atau dua tahun ke depan jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Situbondo sudah mulai menurun lagi.

Penyebab utama terjadinya gizi buruk pada Balita di Kabupaten Situbondo tahun 2019 adalah pengetahuan ibu/keluarga yang masih rendah, yakni sebanyak 82 kasus (50,00%), penyebab terbesar kedua adalah sakit sebanyak 31 kasus (18,90%), kemudian yang ketiga penyebab kemiskinan sebanyak 23 kasus (14,02%), penyebab keempat BBLR sebanyak 17 kasus (10,36%) dan yang terakhir penyebab lain-lain sebanyak 11 kasus (6,70%). Sebelumnya di tahun 2018 pengetahuan ibu/keluarga juga menjadi penyebab utama kejadian gizi buruk, yakni 38,73% atau sebanyak 55 kasus. Penyebab kasus gizi buruk di Kabupaten Situbondo tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2.18.
Penyebab Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Situbondo tahun 2018-2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Situbondo Tahun 2019

Dari 156 kasus gizi buruk di Kabupaten Situbondo seluruhnya telah ditangani sesuai dengan Tata Laksana Anak Gizi Buruk, yaitu melalui :

- Pemberian Makanan Tambahan (PMT),
- Rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi,
- Perawatan di TFC (*Theurapeutic Feeding Center*) sebagai tempat perawatan dan pengobatan anak gizi buruk secara intensif di ruangan khusus dan ibu/keluarga ikut aktif terlibat.,
- Kontrol kesehatan dan terapi serta edukasi di RPG (Rumah Pemulihan Gizi) dengan semboyan Situbondo Anti Stunting, yakni pemberian Fe dan Asam Folat untuk mencegah anemia, Penguatan ASI Eksklusif, pemberdayaan KADARZI (Keluarga Sadar Gizi) dan penanggulangan KEP, GAKY dan KVA;
- Belajar pembuatan makanan yang bergizi di TPG (Taman Pemulihan Gizi) bertujuan mendekatkan pelayanan gizi untuk mencegah gizi buruk dan intervensi BGM, 2T dan Gizi kurang dengan pemecahan masalah yang sudah ada di masyarakat dan pemberdayaan masyarakat
- Sarasehan kelompok pendukung ASI yang mendukung ibu untuk percaya diri memberikan ASI dan menjaga kelangsungan menyusui dan menurunkan prevalensi balita pendek

2.2.8. Kesehatan pada Penduduk Usia Produktif

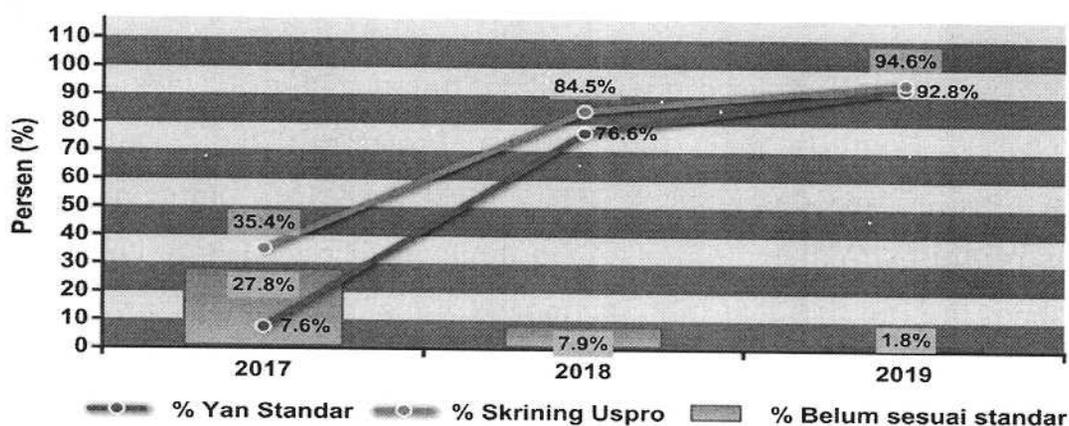
Sesuai amanat PMK No.4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan disebutkan bahwa Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun

(usia produktif) wajib mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan/atau UKBM. Sedangkan pelayanan skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi melakukan rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan. Wanita usia 30-50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual yang berisiko perlu dilakukan pemeriksaan SADANIS dan cek IVA. Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya serta pada UKBM yang ada dalam bentuk Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif Kabupaten Situbondo tahun 2019 mencapai 92,79%, dan lebih dari separuhnya berisiko atau ditemukan memiliki faktor risiko PTM, yakni sebesar 54,29%. cakupan pelayanan kesehatan Uspro mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, baik yang skrining maupun yang sesuai standar seperti terlihat pada Grafik berikut.

Grafik 2.19.
Cakupan Skrining Uspro dan Pelayanan Kesehatan Uspro Sesuai Standar Kabupaten Situbondo Tahun 2017 - 2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada capaian pelayanan kesehatan Uspro sesuai standar selama 3 tahun terakhir, yakni dari 7,6% pada tahun 2017 menjadi 92,8% pada tahun 2019. Sebaliknya, pelayanan kesehatan uspro yang belum sesuai standar menurun signifikan, yakni dari 27,8% pada tahun 2017 menjadi 1,8%

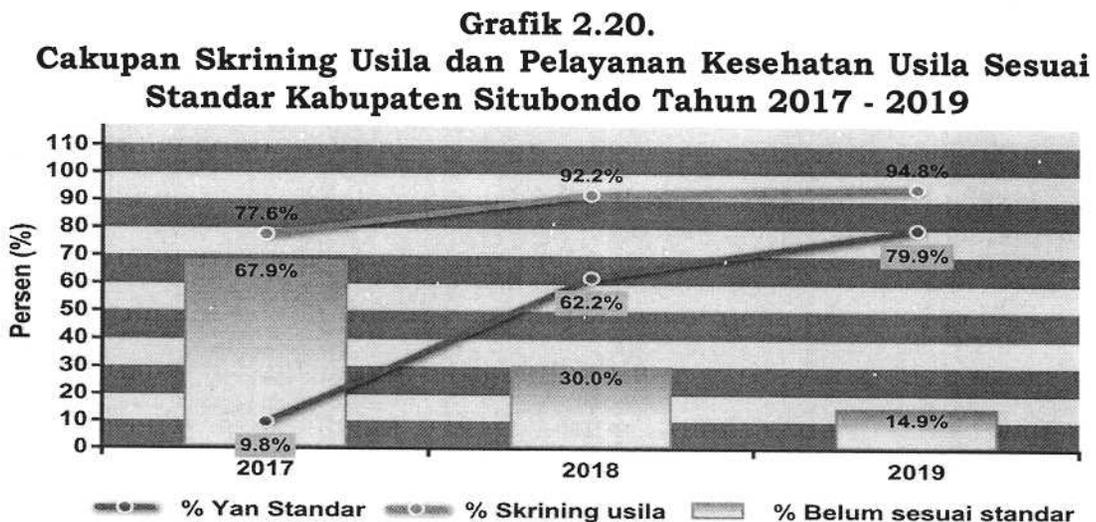
pada tahun 2019. Hal ini berarti bahwa penerapan SPM bidang kesehatan di Kabupaten Situbondo terus menunjukkan kemajuan setelah 3 tahun diterapkan.

2.2.9. Kesehatan Usia Lanjut

Usia lanjut menurut WHO meliputi usia pertengahan (*middle age*) yaitu kelompok usia 45 tahun sampai 59 tahun, lanjut usia (*elderly*) yaitu usia 60 sampai 74 tahun, lanjut usia tua (*old*) yaitu antara 75 tahun sampai 90 tahun dan usia sangat tua (*very old*) yaitu diatas 90 tahun. pelayanan kesehatan Usila merupakan salah satu indikator SPM bidang kesehatan sesuai amanat Permenkes No 4 Tahun 2019, yang menyebutkan setiap Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas (lansia) berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah. Sedangkan Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular, meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut; Pengukuran tekanan darah; Pemeriksaan gula darah; Pemeriksaan gangguan mental; Pemeriksaan gangguan kognitif; Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut; Anamnesa perilaku berisiko.

Jumlah usila di Kabupaten Situbondo tahun 2019 yang sudah akses dengan pelayanan kesehatan sebanyak 91.941 orang. Namun, dari 91.941 lansia yang akses dengan pelayanan kesehatan tersebut baru 77.437 jiwa yang sesuai standar atau sebesar 79,9%.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada capaian pelayanan kesehatan lansia sesuai standar selama 3 tahun terakhir, yakni dari 9,8% pada tahun 2017 menjadi 79,9% pada tahun 2019. Sebaliknya, pelayanan kesehatan lansia yang belum sesuai standar menurun signifikan, yakni dari 67,9% pada tahun 2017 menjadi 14,9% pada tahun 2019. Hal ini berarti bahwa penerapan SPM bidang kesehatan di Kabupaten Situbondo terus menunjukkan kemajuan setelah 3 tahun diterapkan.

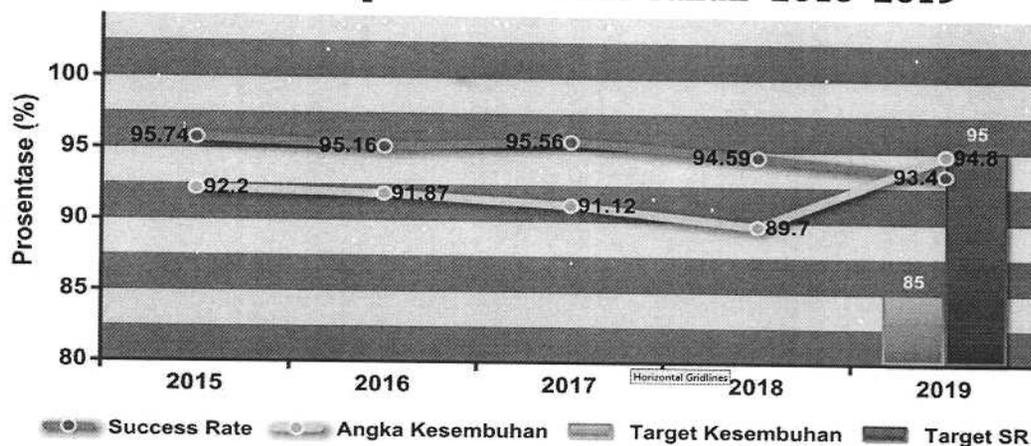
2.2.10. Penyakit Menular TB Paru (TBC)

Penemuan kasus baru TBC tahun 2019 sebesar 1.249 kasus dengan komposisi 660 pasien laki-laki (52,8%) dan 589 pasien perempuan (47,2%). Dari 1249 kasus baru tersebut 77 di antaranya adalah anak-anak (6,2%). Perkiraan kasus baru TBC atau *Case Detection Rate* (CDR) yang sudah ditetapkan tahun 2019 adalah sebesar 1.497. Dengan demikian prosentase pencapaian CDR TBC Kabupaten Situbondo tahun 2019 adalah 83,4%. Sedangkan Angka Notifikasi Kasus atau *Case Notification Rate* adalah angka yang menunjukkan jumlah pasien baru yang ditemukan dan tercatat di antara 100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu dan menggambarkan kecenderungan penemuan kasus dari tahun ke tahun. Angka Notifikasi Kasus TB Paru *all case* pada tahun 2019 adalah sebesar 182,9 kasus per 100.000 penduduk.

Program TBC menjadi salah satu pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan berdasarkan Permenkes No 4. Tahun 2019, yakni Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis. Artinya, setiap orang terduga TBC harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi : Pemeriksaan klinis, Pemeriksaan penunjang dan Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.

Dari sisi kesembuhan penderita yang diobati, angka yang didapatkan tahun 2019 adalah 94,8%, sedangkan untuk angka keberhasilan (*Success Rate*) penderita TB BTA positif kasus baru pada tahun 2019 sebesar 93,4%. Prosentase penderita yang meninggal selama masa pengobatan tahun 2019, yaitu 4,2% atau 52 kematian. Trend Angka Kesembuhan dan Angka Keberhasilan Pengobatan Kabupaten Situbondo Tahun 2015 s.d 2019 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.21.
Trend Angka Kesembuhan dan Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan angka kesembuhan *Tuberculosis* (TBC), yaitu :

- a. Pe
 mberian Makanan Tambahan (PMT) dan pemberian suplemen vitamin bagi penderita TB, berupa susu dan pemberian suplemen vitamin untuk menaikkan berat badan sehingga penderita TB dapat mempunyai status gizi yang baik.
- b. Pe
 lacakan kasus TB mangkir oleh petugas TB puskesmas apabila terdapat penderita TB yang tidak datang mengambil obat.
- c. Pembentukan Forum Paguyuban TB sebagai media berbagi informasi tentang TB sehingga terbentuk keterikatan sosial dan psikologis di antara sesama penderita TB.

2.2.11. Penyakit Menular Pneumonia

Pneumonia atau infeksi saluran pernafasan akut lebih difokuskan pada balita karena Pneumonia masih menjadi penyebab utama kematian balita. Program ini diutamakan pada upaya penemuan dini dan tata laksana kasus yang cepat dan tepat terhadap penderita Pneumonia yang ditemukan. Jumlah penderita Pneumonia balita yang ditangani di Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 sebanyak 2.789 kasus.

Upaya peningkatan cakupan pnemonia khususnya bagi kecamatan yang belum mencapai target melalui :

- a. FGD dengan Camat dan Kepala Desa
- b. Penentuan target desa

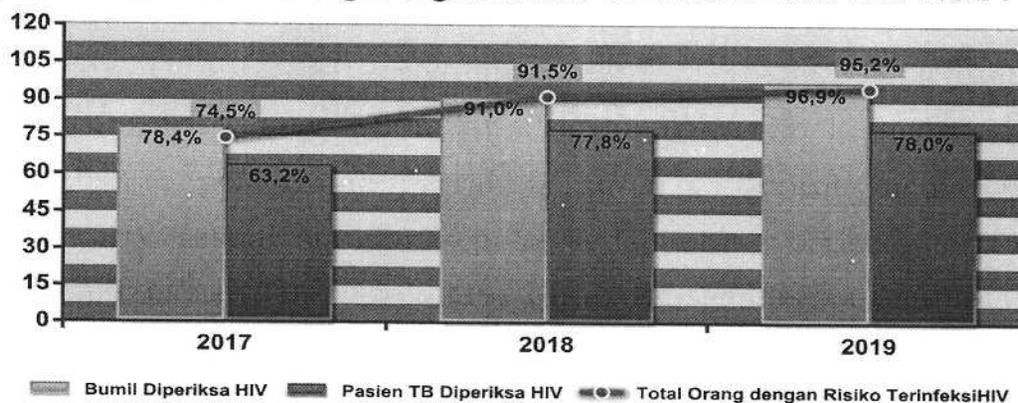
- c. Refresh Tatalaksana Pnemonia bagi petugas wilayah
- d. Monitoring Terpadu terkait pelaksanaan MTBS (Manajemen Tata Laksana Balita Sakit) dengan program KIA diharapkan akan mampu meningkatkan cakupan penemuan dan penanganan Pneumonia Balita

2.2.12. Penyakit Menular HIV / AIDS

AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) merupakan kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*). Akibat dari penurunan daya tahan tersebut penderita jadi mudah terserang berbagai macam penyakit infeksi (Infeksi Oportunistik). Di kabupaten Situbondo, perempuan penderita HIV/AIDS lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2019 tercatat 287 kasus baru HIV dengan komposisi 127 kasus adalah laki-laki (44,3%) dan 160 kasus perempuan (55,7%). Berdasarkan kelompok umur kasus HIV didominasi oleh umur seksual aktif usia 25-49 tahun, yakni sebanyak 202 kasus (70,4%). Sedangkan kasus baru AIDS Kabupaten Situbondo Tahun 2019 adalah sebanyak 205 kasus dengan komposisi 105 kasus adalah laki-laki (51,2%) dan 100 kasus perempuan (48,8%). Berdasarkan kelompok umur kasus AIDS didominasi usia 30-39 tahun, yakni sebanyak 77 kasus (37,6%).

Berdasarkan amanat Permenkes No 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya direvisi menjadi Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan disebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pemeriksaan HIV sesuai standar kepada setiap orang berisiko terinfeksi HIV, yakni ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan. Hasil pemeriksaan HIV orang-orang berisiko terinfeksi HIV tahun 2017 dan tahun 2019 disajikan pada Grafik berikut.

Grafik 2.22.
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Th. 2017-2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo tahun 2019

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang sudah dilakukan adalah :

- a. Peningkatan peran masyarakat dalam bentuk kegiatan Warga Peduli AIDS
- b. Pendampingan kelompok beresiko tinggi dan intervensi perubahan perilaku
- c. Pemenuhan Reagen HIV 1, 2 dan 3
- d. Pengembangan Layanan Konseling dan Testing HIV termasuk IMS di puskesmas bagi Populasi Beresiko (ibu hamil dan pasien TBC) dan Populasi Kunci (waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)
- e. Layanan Pemeriksaan Sampel Darah Terpadu dan Terintegrasi termasuk PMI dan layanan swasta
- f. Kerjasama dengan Dinas Sosial dalam pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis rumah tangga dan kegiatan lain yang menunjang pemberantasan HIV/AIDS
- g. Kerjasama dengan organisasi yang bekerja untuk isu-isu HIV
- h. Pengembangan Layanan Konseling dan Testing HIV melalui mobile klinik
- i. Revitalisasi Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Situbondo

2.2.13. Penyakit Menular Diare

di Indonesia, diare adalah pembunuh balita nomor dua setelah ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). Sementara UNICEF (Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan anak) memperkirakan bahwa, setiap 30 detik ada satu anak yang meninggal dunia karena Diare.

Jumlah penderita diare semua umur yang ditangani di sarana kesehatan Kabupaten Situbondo tahun 2019 sebesar 15.267 kasus. Sedangkan jumlah penderita Diare Balita yang ditangani di sarana kesehatan Kabupaten Situbondo tahun 2019 sebesar 6.284 kasus, atau sebesar 84,6 %.

Tata laksana program Diare pada Balita yang berkualitas melalui Lintas Diare (Lima Langkah Tuntaskan Diare) :

- a. Pemberian Oralit untuk mencegah dan mengatasi dehidrasi.
- b. Pemberian sirup Zinc sesuai umur selama 10 hari berturut-turut kepada balita. Zinc dapat mengurangi lama dan beratnya Diare, mencegah berulangnya Diare selama 2-3 bulan dan mengembalikan nafsu makan anak.

- c. ASI dan makanan tetap diteruskan sesuai umur anak dengan menu yang sama pada waktu anak sehat, untuk mencegah kehilangan berat badan serta pengganti nutrisi yang hilang.
- d. Antibiotik hanya diberikan pada diare berdarah, kolera dan diare dengan masalah lain.
- e. Segera kembali ke petugas kesehatan jika ada demam, tinja berdarah, muntah berulang, makan atau minum sedikit, sangat haus diare makin sering atau belum membaik dalam 3 hari.

2.3. Aspek Politik dan Ekonomi

2.3.1. Politik

Sebagai ukuran keberhasilan Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG adalah tingkat keterlibatan perempuan dalam berperan aktif di kehidupan ekonomi dan politik.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD, yang menyebutkan tentang kewajiban kuota 30 persen bagi calon legislatif perempuan, yang merupakan salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Dalam tabel berikut di bawah dapat terlihat bahwa keterlibatan perempuan di parlemen tahun 2019, Kabupaten Situbondo lebih unggul daripada kabupaten sekitar, yaitu Jember, Banyuwangi, Bondowoso, serta Jawa Timur maupun nasional, dengan capaian 24,44.

Tabel 2.11.
Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sekitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019

Provinsi / Kabupaten	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)				
	2019	2018	2017	2016	2015
JAWA TIMUR	18.33	15	15	15	15
JEMBER	18	22	20	-	20.41
BANYUWANGI	26	20	20	-	18
BONDOWOSO	11.11	6.67	4.44	-	4.44
SITUBONDO	24.44	24.44	22.22	-	22.22
PROBOLINGGO	26	24.44	24.44	-	24.44
INDONESIA	20.52	17.32	17.32	17.32	17.32

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2015-2019

Selanjutnya, apabila dilihat dari kesempatan perempuan menduduki posisi tenaga profesional, Situbondo masih dibawah kabupaten sekitar, Jawa Timur dan nasional, sebagaimana tabel di bawah, dengan nilai 43,37 persen pada tahun 2019. Namun jika dilihat dari tahun 2018 ke 2019, mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 4,2 poin dengan nilai pertumbuhan 10,72 persen.

Tabel 2.12.
Perempuan sebagai Tenaga Profesional
Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sekitar, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2015-2019

Provinsi / Kabupaten	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)				
	2019	2018	2017	2016	2015
JAWA TIMUR	48.90	47.68	47.36	48.14	46.44
JEMBER	46.60	52.36	47.93	-	49.24
BANYUWANGI	48.20	46.86	45.71	-	46.55
BONDOWOSO	48.95	44.15	49.39	-	41.85
SITUBONDO	43.37	39.17	36.54	-	38.02
PROBOLINGGO	44.11	45.24	37.53	-	42.36
INDONESIA	47.46	47.02	46.31	47.59	46.03

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2015-2019

2.3.2. Ekonomi

Dari sisi ekonomi, pada umumnya laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab yang besar di sektor ekonomi bagi rumah tangganya dibandingkan perempuan. Namun demikian, perempuan yang terlibat di sektor ekonomi menunjukkan trend yang terus meningkat. Keterlibatan perempuan dalam bekerja ini dikarenakan faktor ekonomi yang mengharuskan untuk bekerja atau karena adanya motivasi lain.

hal ini dapat terlihat dari sumbangan pendapatan perempuan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan pada tahun 2019 sebesar 27,62 persen, naik sebesar 0,18 poin atau naik sebesar 0,66 persen dari tahun 2018. Namun masih dibawah Jawa Timur dan nasional, meskipun setiap tahun mengalami kenaikan sejak tahun 2015. Apabila dilihat dari kabupaten sekitar, Situbondo masih di atas dari Kabupaten Probolinggo, namun masih dibawah Kabupaten Jember, Banyuwangi dan Bondowoso.

Tabel 2.13.
Sumbangan Pendapatan Perempuan Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sekitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019

Provinsi / Kabupaten	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)				
	2019	2018	2017	2016	2015
JAWA TIMUR	35.68	35.64	35.63	35.52	35.17
JEMBER	30.86	30.70	30.67	-	30.54
BANYUWANGI	31.01	30.98	30.97	-	30.96
BONDOWOSO	37.42	37.38	37.35	-	37.36
SITUBONDO	27.62	27.44	27.40	-	27.20
PROBOLINGGO	25.42	25.31	25.18	-	24.79
INDONESIA	37.10	36.70	36.62	36.42	36.03

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2015-2019

2.3.2.1. Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih, yang termasuk angkatan kerja, baik yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Tabel 2.14.
Penduduk Usia Kerja Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019

Gol Umur	2016			2017			2018			2019		
	LK	PR	JUML									
15-19	21328	22751	44079	21167	22556	43723	21001	22373	43374	20864	22173	43037
20-24	24780	25259	50039	24537	25090	49627	24315	24886	49201	24106	24689	48795
25-29	26020	26427	52447	25802	26208	52010	25577	26028	51605	25349	25840	51189
30-34	25513	24851	50364	25378	24647	50025	25224	24413	49637	25048	24182	49230
35-39	26146	28259	54405	26068	28175	54243	25999	28099	54098	25922	27991	53913
40-44	26458	26229	52687	26492	26222	52714	26456	26159	52615	26413	26104	52517
45-49	24639	25606	50245	24993	25923	50916	25335	26195	51530	25568	26399	51967
50-54	22152	24023	46175	22491	24412	46903	22813	24802	47615	23174	25191	48365
55-59	20898	21459	42357	21434	22160	43594	21938	22812	44750	22411	23441	45852
60+	16937	17996	34933	17562	18676	36238	18183	19367	37550	18756	20020	38776
JUML	234871	242860	477731	235924	244069	479993	236841	245134	481975	237611	246030	483641

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

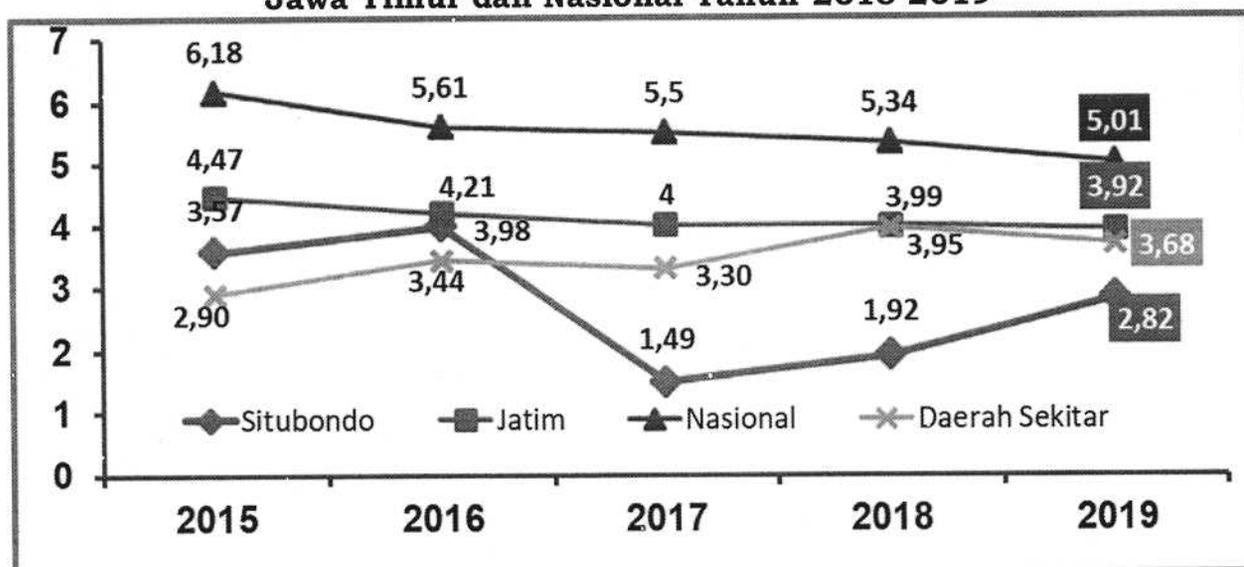
Sebagai tabel tersebut di atas, dapat terlihat bahwa penduduk usia kerja perempuan di Kabupaten Situbondo lebih tinggi daripada penduduk usia kerja laki-laki, dengan rata-rata sebesar 50,85 persen mulai tahun 2016 sampai dengan 2019. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah penduduk Kabupaten Situbondo secara keseluruhan, di mana jumlah penduduk perempuan lebih besar daripada laki-laki.

2.3.2.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Grafik 2.23.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Situbondo, Daerah Sekitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019

Perkembangan TPT di Kabupaten Situbondo sejak tahun 2015 menunjukkan trend penurunan yang cukup signifikan sampai tahun 2019 sebesar 2,82, dan terendah nomor 8 (delapan) se-Jawa Timur. Dan apabila dibandingkan rata-rata/ agregat capaian daerah sekitar dan provinsi serta nasional, TPT Situbondo menduduki posisi terendah.

Apabila dilihat dari jumlah pencari kerja menurut jenis kelamin pada tahun 2019, tampak bahwa jenis kelamin perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, sebesar 51,33 persen. Sedangkan menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan tahun 2019, untuk SD, SMP, Diploma, dan Universitas, pencari kerja perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 58,95 persen. Data lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15.
Jumlah Pencari Kerja menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Jumlah Pencari kerja menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan (Jiwa)											
	Laki-laki				Perempuan				Jumlah			
	2019	2018	2017	2016	2019	2018	2017	2016	2019	2018	2017	2016
Sekolah Dasar	1	-	-	1	13	4	3	-	14	4	3	1
Sekolah Menengah Pertama	9	6	2	3	18	3	5	2	27	9	7	5
Sekolah Menengah Atas	268	164	129	151	196	125	86	85	464	289	215	236
Sekolah Menengah Kejuruan	-	132	95	103	-	81	50	85	-	213	145	188
Diploma	37	43	29	54	60	67	95	57	97	110	124	111
Universitas	180	209	112	215	235	276	123	218	415	485	362	433
Jumlah	495	554	367	527	522	556	362	447	1017	1110	729	974

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2015-2019

Tabel 2.16.
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Berasal dari Kabupaten Situbondo menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2019

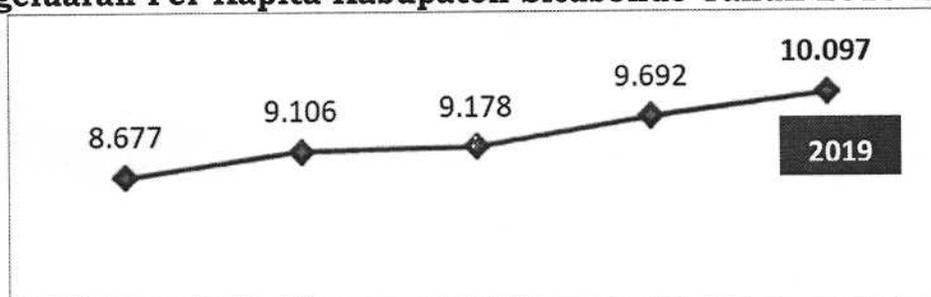
No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sumbermalang	2	4	6
2	Jatibanteng	6	3	9
3	Banyuglugur	12	15	27
4	Besuki	40	32	72
5	Suboh	12	14	26
6	Mlandingan	18	17	35
7	Bungatan	16	13	29
8	Kendit	15	26	41
9	Panarukan	69	75	144
10	Situbondo	72	94	166
11	Mangaran	29	18	47
12	Panji	93	90	173
13	Kapongan	27	27	54
14	Arjasa	17	14	31
15	Jangkar	16	21	37
16	Asembagus	37	38	75
17	Banyuputih	14	31	45
	Jumlah	495	532	1017

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019

2.3.2.3. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Grafik 2.5.
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019

Tabel 2.17.
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan menurut Jenis Kelamin Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sekitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019

Provinsi/Kabupaten	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan menurut Jenis Kelamin (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)									
	Perempuan					Laki-laki				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
JAWA TIMUR	10137	9820	9580	9459	9264.48	16837	16321	15671	15063	14579.32
Jember	6242	6026	5800	-	5673.93	14732	14025	13462	-	12772.82
Banyuwangi	8047	7810	7516	-	7126.32	19421	18701	18124	-	16785.13
Bondowoso	9540	9249	9032	-	8623.95	14685	14453	13849	-	12992.76
Situbondo	7776	7447	7077	-	6782.12	15457	14934	14041	-	13247.96
Probolinggo	7573	7342	7077	-	6999.24	17320	16801	16173	-	15478.30
INDONESIA	9244	9042	8752	8591	8464.16	15866	15546	14932	14554	14163.15

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015-2019

Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan menurut jenis kelamin di Kabupaten Situbondo, perempuan berada di bawah laki-laki dengan perbedaan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 7681 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun 2019, dan sebesar 7487 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun 2018. Seperti halnya Situbondo, di kabupaten sekitar, Jawa Timur dan nasional juga memiliki trend yang sama, dimana pengeluaran per kapita perempuan berada di bawah pengeluaran per kapita laki-laki.

BAB III

ISU GENDER

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Situbondo masih dibawah Jawa Timur dan nasional, meskipun tiap tahun mengalami kenaikan. Apabila IPM dilihat dari jenis kelamin, akan tampak bahwa IPM perempuan selalu berada di bawah IPM laki-laki. Pada tahun 2019, terdapat perbedaan 9,37 poin, tahun 2018 sebesar 9,61 dan tahun 2017 sebesar 9,44. Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kesenjangan 9 poin lebih, meskipun pada tahun 2019 sudah mulai menurun sebesar 0,24 poin.

Sedangkan pada indikator Indeks Pembangunan Gender atau IPG, menunjukkan kenaikan sebesar 0,42 poin pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Namun masih pada posisi di bawah Jawa Timur dan nasional, meskipun lebih tinggi daripada Kabupaten Banyuwangi, Jember dan Probolinggo.

Untuk indikator Indeks Peremberdayaan Gender atau IDG, Situbondo mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 2,27 poin. IDG Situbondo berada di atas Kabupaten Jember, Bondowoso dan Probolinggo, namun masih belum mendongkrak posisi Situbondo di bawah Banyuwangi, Jawa Timur dan nasional.

3.1. Permasalahan Gender

3.1.1. Bidang Pendidikan

Isu Gender Bidang Pendidikan meliputi :

- a. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah perempuan daripada angka rata-rata lama sekolah laki-laki. Pada tahun 2019 angka rata-rata lama sekolah perempuan sebesar 5,44 dan tahun 2018 sebesar 5,43. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah laki-laki tahun 2019 sebesar 6,93 dan tahun 2018 sebesar 6,92. Hal ini menandakan bahwa jumlah tahun yang dipergunakan penduduk perempuan usia sekolah untuk menjalani pendidikan formal adalah 5 tahun, sedangkan untuk penduduk laki-laki usia sekolah adalah 6 tahun.
- b. Masih melekat kuat budaya masyarakat untuk menikahkan anak-anak pada usia muda. Pada tahun 2019 jumlah pernikahan usia dini laki-laki sebanyak 113 orang atau 84,96 persen, dan pernikahan usia dini perempuan sebanyak 20 orang atau 15 persen, dari total jumlah

pernikahan usia dini. Apabila dibandingkan total jumlah pernikahan di Kabupaten Situbondo, prosentase pernikahan usia dini tahun 2019 sebesar 2,31 persen, dan tahun 2018 sebesar 2,07 persen. Dengan masih melekatnya budaya untuk menikahkan anak pada usia muda, salah satunya membuat angka putus sekolah masih cukup tinggi.

- c. Tingginya angka putus sekolah pada tingkat pendidikan SD/MI dan SMP/MTS. Tinggi angka putus sekolah atau APS di Kabupaten Situbondo merupakan tantangan yang harus diselesaikan. Kenaikan APS SD/MI tahun 2019 dari tahun 2018 sebesar 183,33 persen, sedangkan kenaikan APS SMP/MTS tahun 2019 dari tahun 2018 sebesar 49,23 persen. Hal ini menunjukkan anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD/MI masih lebih tinggi, jika dibandingkan dengan anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SMP/MTS.
- d. Angka Partisipasi Murni perempuan SMP/MTS turun dari Angka Partisipasi Murni perempuan SD/MI. Pada tahun 2019 APM perempuan SMP/MTS sebesar 81,79 persen, sedangkan APM Perempuan SD/MI sebesar 104,29 persen. Hal ini menandakan bahwa keterlibatan perempuan di jenjang pendidikan SMP/MTS mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan keterlibatan perempuan di jenjang pendidikan SD/MI. salah satu faktor penyebabnya adalah pernikahan usia dini yang masih cukup tinggi di Situbondo.

3.1.2. Bidang Kesehatan

Isu Gender Bidang Kesehatan meliputi :

- a. Angka Kematian Ibu atau AKI mengalami kenaikan sejak tahun 2017 sampai dengan 2019. AKI tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 39,73 persen dari tahun 2018, dan AKI Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 27,52 persen dari tahun 2017. Sementara sebelumnya, AKI tahun 2017 justru mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2016 sebesar 41,43 persen.

Hal ini menunjukkan masih banyaknya permasalahan yang harus segera ditangani untuk penyelesaiannya. Beberapa permasalahan yang dijumpai di lapangan terkait upaya penurunan AKI adalah :

- 1) Pelaksanaan Sistem rujukan yang belum sepenuhnya sesuai SOP dari tingkat bawah/ wilayah sampai dengan Rumah sakit;

- 2) Kurangnya sarana pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang menjadi rujukan persalinan terutama pada kasus nyeri kepala yang tidak hilang dengan *therapy* (MRI dan *CT Scan*);
 - 3) Pelayanan Ante Natal Care atau ANC kurang optimal dikarenakan belum semua petugas melakukan analisa hasil pemeriksaan sebagai bahan tindak lanjut pelayanan;
 - 4) Belum semua bidan mengikuti Pelatihan Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal;
 - 5) Keterbatasan tenaga Bidan di wilayah sehingga penanggungjawab wilayah adalah bidan magang yang sering dilakukan rotasi;
 - 6) Sebagian wilayah terpencil dengan kondisi geografis yang sulit sehingga terjadi keterlambatan dalam penanganan kegawat daruratan maternal perinatal;
- b. Trend Angka Kematian Bayi atau AKB masih menunjukkan peningkatan. Apabila dilihat dari perkembangan AKB, tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 12,88 persen, namun di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 18 persen dari tahun 2017. Sedangkan di tahun 2017 mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 36,18 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya untuk menurunkan AKB masih merupakan prioritas untuk penyelesaiannya. Hambatan yang ditemui di lapangan adalah :
- 1) Keterbatasannya Sarana Prasarana dan SDM di Rumah Sakit Rujukan (Oksigen central ruang Perinatologi, CPAP dan Ventilator);
 - 2) Belum adanya komitmen bersama dalam penatalaksanaan Ibu Hamil dengan kontraksi dini yang beresiko persalinan prematur antara Rumah Sakit dengan Puskesmas;
 - 3) Perilaku dan budaya dari masyarakat setempat yang tidak mendukung upaya penurunan AKB, misal pengambilan keputusan yang terlambat dikarenakan permasalahan biaya karena belum semua masyarakat memiliki kepesertaan JKN baik mandiri maupun PBI;
 - 4) Masih adanya kepercayaan masyarakat terhadap orang yang dituakan dalam perawatan bayi;
 - 5) Banyaknya Kasus BBLR yang sebagian besar adalah persalinan premature;

- 6) Pengetahuan masyarakat tentang bayi resiko tinggi (terutama bayi berat lahir rendah < 2500 gram atau BBLR) masih rendah.
- c. Kasus bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) cenderung mengalami penurunan, namun tidak terlalu signifikan. Selama empat tahun terakhir kasus BBLR di Kabupaten Situbondo cenderung mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan, yakni dari 7,8% (699 kasus) tahun 2016 menjadi 7,72% tahun 2017 (695 kasus), tahun 2018 kembali menurun menjadi 7,70% (706 kasus) dan tahun 2019 menjadi 7,4% (672 kasus).
 - d. Balita Gizi Buruk mengalami peningkatan di satu tahun terakhir. Kasus gizi buruk di Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan ditahun 2019 yakni dari 131 kasus pada tahun 2018 (0,29%) menjadi 156 kasus (0,35%) pada tahun 2019.
 - e. Sebagian masyarakat masih enggan memeriksakan kehamilannya pada usia muda. Hal ini terjadi karena adanya anggapan masyarakat bahwa ibu hamil yang memeriksakan kehamilan di usia kehamilan yang masih muda itu pamali dan mengakibatkan akan kehilangan bayinya.
 - f. Penyakit menular seperti tuberculosis, pneumonia, diare, HIV/AIDS, sebagian besar penderitanya adalah perempuan dan anak-anak. Dari kasus baru tuberculosis, 6,2 persennya adalah anak-anak. Untuk Pneumonia masih merupakan kasus utama kematian balita, sedangkan diare adalah kasus nomor dua yang menyebabkan kematian balita. Di Situbondo, 84,6 persen penderita diare adalah balita. Sedangkan HIV/AIDS, perempuan penderita HIV/AIDS lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu sebesar 55,7 persen.

3.1.3. Bidang Ekonomi

Isu gender Bidang Ekonomi meliputi :

- a. Informasi pasar kerja belum sepenuhnya bisa diakses oleh masyarakat, latar pendidikan yang rendah;
- b. Sumber daya manusia pencari kerja masih rendah. Pencari kerja dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SD dan SMP, perempuan masih lebih tinggi daripada pria, dengan persentase 4,02 persen, atau 21 perempuan dari 522 perempuan pencari kerja. Sedangkan laki-laki, hanya 2,02 persen, atau 10 laki-laki dari 495 laki-laki pencari kerja;

- c. Rendahnya tingkat kemampuan pelaku usaha mikro untuk beradaptasi terhadap pengembangan teknologi informasi;
- d. Aspek manajemen dan permodalan serta aspek usaha yang dijalankan oleh koperasi masih rendah;
- e. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang masih terbatas dalam bidang kepariwisataan;
- f. Masih belum maksimalnya peran masyarakat sekitar obyek wisata dalam pengembangan wisata;
- g. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia kelompok tani masih kurang dalam penerapan teknologi budidaya pertanian;
- h. Minimnya akses permodalan dan sarana prasarana produksi bagi Industri Kecil Menengah;
- i. Kurangnya pengetahuan manajemen produksi dan usaha Industri Kecil Menengah.

3.1.4. Bidang Publik

Isu gender di Bidang Publik meliputi :

- a. Terdapat ketimpangan proporsi pejabat eksekutif perempuan dan laki-laki, khususnya pada jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Situbondo per tahun 2019, didapatkan data bahwa pejabat eselon II perempuan sebesar 8,3 persen, pejabat eselon III perempuan sebesar 19,88 persen, pejabat eselon IV perempuan sebesar 30,35 persen;
- b. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif belum mencapai 30 persen. Prosentase keterwakilan perempuan tahun 2019 dan 2018 sebesar 24,44 persen, Meskipun belum mencapai 30 persen, namun angka ini naik dari tahun 2017 yaitu 22, 22 persen;
- c. Fungsi dan peran pokja PUG Kabupaten masih belum optimal;
- d. Akses perempuan dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang masih terbatas.

3.1.5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isu gender di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi :

- a. Masih adanya marginalisasi terhadap perempuan;
- b. Masih adanya marginalisasi terhadap disabilitas;

- c. Minimnya pendidikan. Pengetahuan dan ketrampilan kaum perempuan sehingga kurang memiliki daya saing di dunia kerja;
- d. Kurangnya pemahaman tentang pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan anak di masyarakat;
- e. Belum semua pemangku kepentingan yang memahami pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan;
- f. Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3.2. Isu Gender

Dari berbagai macam permasalahan tersebut di atas, didapatkan isu gender yang utama adalah Penurunan Kemiskinan. Isu penurunan kemiskinan, ditangani melalui program-program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan Di Kabupaten Situbondo. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan peran masyarakat serta fungsi lembaga-lembaga desa, untuk mendorong kesadaran kaum miskin dalam memperbaiki nasibnya. Program-program pengentasan kemiskinan dilaksanakan melalui dua cara yaitu :

- a. mengurangi beban biaya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin, seperti misalnya : biaya pendidikan, biaya kesehatan, infrastruktur seperti air bersih, jalan desa sebagainya;
- b. meningkatkan pendapatan Rumah Tangga Miskin dan hampir miskin dengan jalan antara lain pelatihan ekonomi produktif, usaha ekonomi, stimulan modal kerja/usaha, pasar desa dan kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan produksi melalui teknologi tepat guna.

BAB IV

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

4.1. PUG dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Daerah

Dalam setiap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Situbondo, isu gender merupakan permasalahan utama yang merupakan prioritas pemerintah kabupaten dalam penyelesaiannya. Hal ini tergambar jelas pada :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun 2005 - 2025;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2019;
- c. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
- d. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2019;
- e. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018;
- f. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019;
- g. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020;
- h. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
- i. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

- j. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Situbondo;

4.2. PUG dalam Siklus Pembangunan di Daerah

Gender dipahami sebagai perbedaan sifat, peran, fungsi dan status antara perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh relasi sosial, budaya dan struktur masyarakat yang lebih luas. Perbedaan gender seringkali menyebabkan terjadinya ketidakadilan, misalnya seseorang tidak mendapatkan kesempatan memegang tanggung jawab tertentu karena perempuan/laki-laki, dan bukan karena kemampuan yang dimiliki. Untuk mengatasi kesenjangan gender, Pemerintah melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000, menerapkan strategi PUG untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan. PUG merupakan strategi yang mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yang lebih adil dan merata.

Dalam pelaksanaan PUG mensyaratkan dipenuhinya tujuh prasyarat, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data, alat analisis dan partisipasi masyarakat.

Tabel 4.1.
Prasyarat Pengarusutamaan Gender

No	Prasyarat PUG	Keterangan
1.	Komitmen	Adanya komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra
2.	Kebijakan	Adanya kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan (kebijakan, strategi, program, panduan, juklak/juknis dll).
3.	Kelembagaan	Adanya struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG seperti Pokja PUG, focal point, forum dan tim.

No	Prasyarat PUG	Keterangan
4.	Sumber Daya	Adanya sumber daya yang memadai, yaitu : Sumber Daya Manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender. Sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG dan ARG.
5.	Data Terpilah	Adanya sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin.
6.	Alat Analisis	Ada alat analisis, untuk perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi.
7.	Partisipasi Masyarakat	Adanya dorongan masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG.

Berdasarkan tujuh prasyarat pengarusutamaan gender tersebut di atas, untuk kondisi di Kabupaten Situbondo dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komitmen

Komitmen Bupati Situbondo dalam melaksanakan Pengarusutamaan PUG dilaksanakan dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain :

- a. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- b. Penguatan kelembagaan PUG;
- c. Penyusunan dan pengembangan data terpilah melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- d. Pengembangan statistik gender.

Adapun komitmen Pemerintah Daerah yang terkait gender, disabilitas, kelompok marginal dan rentan, terdapat pada aturan berikut :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
- b. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 99 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

- c. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin;
- d. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Selain itu, komitmen juga tersirat dan tertuang pada internal proses perspektif, yang merupakan serangkaian proses yang harus dilakukan, yaitu :

- a. **Adanya Kebijakan Pembangunan Kabupaten Situbondo yang Efektif.** Kebijakan yang responsif gender adalah kebijakan yang efektif, yang berorientasi pada ketepatan sasaran. Hal ini dapat dilihat dari visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang terarah dan fokus, dengan alat ukur keberhasilan pembangunan yang jelas dan terukur. Sedangkan sasaran pemanfaatan pembangunan adalah seluruh masyarakat, baik perempuan dan laki-laki, kelompok marginal, rentan, disabilitas, anak dan lansia.
- b. **Terwujudnya masyarakat Situbondo yang Madani, Mandiri, serta Lebih Beriman, Sejahtera dan Berkeadilan.** Kata “berkeadilan” dalam rumusan Visi Situbondo tersebut mengandung makna bahwa upaya untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat Situbondo dan mengurangi kesenjangan sosial, harus dilakukan secara menyeluruh, dengan dilandasi keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan kelompok/wilayah yang masih lemah, dengan komitmen yang sungguh-sungguh untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis, dan menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial, sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek terhadap gender.

Salah satu wujud komitmen Situbondo untuk berkeadilan di setiap sendi pembangunan, dengan ditetapkannya **“Situbondosebagai Kabupaten Inklusif Ramah Disabilitas di Indonesia.”**Dicanangkan pada saat Hari Disabilitas Internasional Tahun 2018.Situbondo telah memiliki Road Map Situbondo Kabupaten Inklusi 2018-2022. Adapun prinsip-prinsip Kabupaten Situbondo Inklusif ramah disabilitas adalah :

- 1) Penghormatan terhadap martabat, otonomi individu termasuk kebebasan di dalam menentukan pilihan-kemandirian penyandang disabilitas;
- 2) Non Diskriminasi;
- 3) Partisipasi dan inklusi penuh dan efektif di masyarakat;
- 4) Penghormatan kepada perbedaan penyandang disabilitas dan penerimaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari keberagaman manusia dan kemanusiaan;
- 5) Persamaan kesempatan;
- 6) Aksesibilitas;
- 7) Kesetaraan antara pria dan wanita;
- 8) Penghormatan kepada kapasitas perkembangan anak dengan disabilitas/ABK, serta penghormatan terhadap hak-hak anak dengan disabilitas untuk menjaga identitas mereka.

c. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan yang partisipatif. Kata “partisipatif” dalam rumusan tersebut menggambarkan metode yang digunakan dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan. Metode partisipatif merupakan metode pelibatan masyarakat secara proporsional, yang menumbuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat sehingga mempresentasikan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh hak yang sama sebagai warga negara terlepas dari perbedaan apapun.

2. Kebijakan

Kebijakan pembangunan gender di Kabupaten Situbondo, tergambar dengan jelas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek. Hal itu nampak jelas dari penjelasan sebelumnya pada angka 4.1. tersebut di atas.

3. Kelembagaan

Kelembagaan PUG di Kabupaten Situbondo ditandai dengan adanya :

- a. Tim Driver Kabupaten, yang merupakan Tim Penggerak Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Situbondo;
- b. Pokja PUG, yang merupakan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Situbondo;

- c. Rendahnya tingkat kemampuan pelaku usaha mikro untuk beradaptasi terhadap pengembangan teknologi informasi;
- d. Aspek manajemen dan permodalan serta aspek usaha yang dijalankan oleh koperasi masih rendah;
- e. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang masih terbatas dalam bidang kepariwisataan;
- f. Masih belum maksimalnya peran masyarakat sekitar obyek wisata dalam pengembangan wisata;
- g. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia kelompok tani masih kurang dalam penerapan teknologi budidaya pertanian;
- h. Minimnya akses permodalan dan sarana prasarana produksi bagi Industri Kecil Menengah;
- i. Kurangnya pengetahuan manajemen produksi dan usaha Industri Kecil Menengah.

3.1.4. Bidang Publik

Isu gender di Bidang Publik meliputi :

- a. Terdapat ketimpangan proporsi pejabat eksekutif perempuan dan laki-laki, khususnya pada jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Situbondo per tahun 2019, didapatkan data bahwa pejabat eselon II perempuan sebesar 8,3 persen, pejabat eselon III perempuan sebesar 19,88 persen, pejabat eselon IV perempuan sebesar 30,35 persen;
- b. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif belum mencapai 30 persen. Prosentase keterwakilan perempuan tahun 2019 dan 2018 sebesar 24,44 persen, Meskipun belum mencapai 30 persen, namun angka ini naik dari tahun 2017 yaitu 22, 22 persen;
- c. Fungsi dan peran pokja PUG Kabupaten masih belum optimal;
- d. Akses perempuan dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang masih terbatas.

3.1.5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isu gender di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi :

- a. Masih adanya marginalisasi terhadap perempuan;
- b. Masih adanya marginalisasi terhadap disabilitas;

- c. Minimnya pendidikan. Pengetahuan dan ketrampilan kaum perempuan sehingga kurang memiliki daya saing di dunia kerja;
- d. Kurangnya pemahaman tentang pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan anak di masyarakat;
- e. Belum semua pemangku kepentingan yang memahami pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan;
- f. Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3.2. Isu Gender

Dari berbagai macam permasalahan tersebut di atas, didapatkan isu gender yang utama adalah Penurunan Kemiskinan. Isu penurunan kemiskinan, ditangani melalui program-program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan Di Kabupaten Situbondo. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan peran masyarakat serta fungsi lembaga-lembaga desa, untuk mendorong kesadaran kaum miskin dalam memperbaiki nasibnya. Program-program pengentasan kemiskinan dilaksanakan melalui dua cara yaitu :

- a. mengurangi beban biaya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin, seperti misalnya : biaya pendidikan, biaya kesehatan, infrastruktur seperti air bersih, jalan desa sebagainya;
- b. meningkatkan pendapatan Rumah Tangga Miskin dan hampir miskin dengan jalan antara lain pelatihan ekonomi produktif, usaha ekonomi, stimulan modal kerja/usaha, pasar desa dan kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan produksi melalui teknologi tepat guna.

BAB IV

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

4.1. PUG dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Daerah

Dalam setiap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Situbondo, isu gender merupakan permasalahan utama yang merupakan prioritas pemerintah kabupaten dalam penyelesaiannya. Hal ini tergambar jelas pada :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun 2005 - 2025;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2019;
- c. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
- d. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2019;
- e. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018;
- f. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019;
- g. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020;
- h. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
- i. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

- j. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Situbondo;

4.2. PUG dalam Siklus Pembangunan di Daerah

Gender dipahami sebagai perbedaan sifat, peran, fungsi dan status antara perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh relasi sosial, budaya dan struktur masyarakat yang lebih luas. Perbedaan gender seringkali menyebabkan terjadinya ketidakadilan, misalnya seseorang tidak mendapatkan kesempatan memegang tanggung jawab tertentu karena perempuan/laki-laki, dan bukan karena kemampuan yang dimiliki. Untuk mengatasi kesenjangan gender, Pemerintah melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000, menerapkan strategi PUG untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan. PUG merupakan strategi yang mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yang lebih adil dan merata.

Dalam pelaksanaan PUG mensyaratkan dipenuhinya tujuh prasyarat, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data, alat analisis dan partisipasi masyarakat.

Tabel 4.1.
Prasyarat Pengarusutamaan Gender

No	Prasyarat PUG	Keterangan
1.	Komitmen	Adanya komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra
2.	Kebijakan	Adanya kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan (kebijakan, strategi, program, panduan, juklak/juknis dll).
3.	Kelembagaan	Adanya struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG seperti Pokja PUG, focal point, forum dan tim.

No	Prasyarat PUG	Keterangan
4.	Sumber Daya	Adanya sumber daya yang memadai, yaitu : Sumber Daya Manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender. Sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG dan ARG.
5.	Data Terpilah	Adanya sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin.
6.	Alat Analisis	Ada alat analisis, untuk perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi.
7.	Partisipasi Masyarakat	Adanya dorongan masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG.

Berdasarkan tujuh prasyarat pengarusutamaan gender tersebut di atas, untuk kondisi di Kabupaten Situbondo dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komitmen

Komitmen Bupati Situbondo dalam melaksanakan Pengarusutamaan PUG dilaksanakan dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain :

- a. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- b. Penguatan kelembagaan PUG;
- c. Penyusunan dan pengembangan data terpilah melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- d. Pengembangan statistik gender.

Adapun komitmen Pemerintah Daerah yang terkait gender, disabilitas, kelompok marginal dan rentan, terdapat pada aturan berikut :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
- b. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 99 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

- c. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin;
- d. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Selain itu, komitmen juga tersirat dan tertuang pada internal proses perspektif, yang merupakan serangkaian proses yang harus dilakukan, yaitu :

- a. **Adanya Kebijakan Pembangunan Kabupaten Situbondo yang Efektif.** Kebijakan yang responsif gender adalah kebijakan yang efektif, yang berorientasi pada ketepatan sasaran. Hal ini dapat dilihat dari visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang terarah dan fokus, dengan alat ukur keberhasilan pembangunan yang jelas dan terukur. Sedangkan sasaran pemanfaat pembangunan adalah seluruh masyarakat, baik perempuan dan laki-laki, kelompok marginal, rentan, disabilitas, anak dan lansia.
- b. **Terwujudnya masyarakat Situbondo yang Madani, Mandiri, serta Lebih Beriman, Sejahtera dan Berkeadilan.** Kata “berkeadilan” dalam rumusan Visi Situbondo tersebut mengandung makna bahwa upaya untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat Situbondo dan mengurangi kesenjangan sosial, harus dilakukan secara menyeluruh, dengan dilandasi keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan kelompok/wilayah yang masih lemah, dengan komitmen yang sungguh-sungguh untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis, dan menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial, sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek terhadap gender.

Salah satu wujud komitmen Situbondo untuk berkeadilan di setiap sendi pembangunan, dengan ditetapkannya **“Situbondosebagai Kabupaten Inklusif Ramah Disabilitas di Indonesia.”**Dicanangkan pada saat Hari Disabilitas Internasional Tahun 2018.Situbondo telah memiliki Road Map Situbondo Kabupaten Inklusi 2018-2022. Adapun prinsip-prinsip Kabupaten Situbondo Inklusif ramah disabilitas adalah :

- 1) Penghormatan terhadap martabat, otonomi individu termasuk kebebasan di dalam menentukan pilihan-kemandirian penyandang disabilitas;
- 2) Non Diskriminasi;
- 3) Partisipasi dan inklusi penuh dan efektif di masyarakat;
- 4) Penghormatan kepada perbedaan penyandang disabilitas dan penerimaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari keberagaman manusia dan kemanusiaan;
- 5) Persamaan kesempatan;
- 6) Aksesibilitas;
- 7) Kesetaraan antara pria dan wanita;
- 8) Penghormatan kepada kapasitas perkembangan anak dengan disabilitas/ABK, serta penghormatan terhadap hak-hak anak dengan disabilitas untuk menjaga identitas mereka.

c. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan yang partisipatif. Kata “partisipatif” dalam rumusan tersebut menggambarkan metode yang digunakan dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan. Metode partisipatif merupakan metode pelibatan masyarakat secara proporsional, yang menumbuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat sehingga mempresentasikan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh hak yang sama sebagai warga negara terlepas dari perbedaan apapun.

2. Kebijakan

Kebijakan pembangunan gender di Kabupaten Situbondo, tergambar dengan jelas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek. Hal itu nampak jelas dari penjelasan sebelumnya pada angka 4.1. tersebut di atas.

3. Kelembagaan

Kelembagaan PUG di Kabupaten Situbondo ditandai dengan adanya :

- a. Tim Driver Kabupaten, yang merupakan Tim Penggerak Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Situbondo;
- b. Pokja PUG, yang merupakan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Situbondo;

- c. Focal Point PUG, yang merupakan Tim Penggerak Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah;
- d. Fasilitator PUG, yang merupakan seseorang yang memiliki kemampuan untuk memfasilitasi, atau membantu percepatan pelaksanaan PUG di Kabupaten Situbondo.

4. Champion

Kabupaten Situbondo memiliki Gender Champion, yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada seseorang baik itu pribadi atau pejabat, aktifis LSM atau tokoh masyarakat yang peduli. Ini terkait dengan perkembangan dan kemajuan Pengarusutamaan Gender (PUG). Selain itu juga mendorong atau memberikan kontribusi untuk pencapaian kesetaraan gender di daerah.

Gender Champion di Kabupaten Situbondo adalah Hj. Umi Kulsum, SH, dan diberikan piagam penghargaan dari Bupati Situbondo.

5. Data Terpilah

Sebagai upaya percepatan pembangunan responsif gender, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mengoptimalkan kinerja aparatur Pemerintah Daerah, Kabupaten Situbondo membangun sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terpilah sesuai kebutuhan perangkat daerah, dengan berbagai macam aplikasi yaitu :

- a. Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif(DTD-AKP);
- b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- c. Sistem Informasi Pengendalian Sampah(SiPesah);
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID)Kabupaten Situbondo;
- e. Ekonomi Kebersamaan(Kobessa);
- f. UTD PMI;
- g. Kuesioner BAPPEDA;
- h. SDTIK (Sumber Daya TIK);
- i. DILAN (Dashboard Informasi dan Laporan ASN);
- j. Dinas Kesehatan;

Pengaturan sistem teknologi informasi dan komunikasi Situbondo adalah sebuah konsep pengembangan dan pengelolaan daerah dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam daerah dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan, yang selanjutnya disebut **Situbondo Smart Society**, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Situbondo *Smart Society*.

6. Alat Analisis

Alat analisis gender yang digunakan oleh Kabupaten Situbondo adalah Gender Analisis Pathway (GAP), sejak tahun 2013. Kegiatan yang telah dianalisis kemudian dituangkan dalam GBS untuk dialokasikan anggarannya dan dilampirkan dalam RKA Perangkat Daerah. Dengan demikian analisis gender telah direspon dengan sejumlah anggaran untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Kegiatan yang telah merespon isu gender harus dimonitoring dan dievaluasi pelaksanaannya, apakah telah sesuai sebagaimana tujuan yang diharapkan untuk mengurangi kesenjangan gender, karena anggaran responsif gender bekerja dengan menelaah dampak yang terjadi, apakah anggaran yang telah dialokasikan memberikan dampak sebagaimana yang diharapkan.

7. Partisipasi Masyarakat

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender, salah satunya dapat berupa pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang-ruang publik, dan melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak perempuan dan

anak.Selain itu, ikut serta aktif dalam tahapan proses perencanaan pembangunan di kabupaten.

4.3. Penguatan Kelembagaan PUG di Daerah

1. Tim Driver Kabupaten

Dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/277/P/004.2/2019 Tim Penggerak (Driver) Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Situbondo. Adapun susunan tim driver ini melibatkan unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur Sekretariat Daerah, unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah.

Adapun tugas tim penggerak atau tim driver adalah :

- a. Meneliti kepastian pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender atau PPRG dalam Penyusunan RKA-SKPD;
- b. Melakukan peningkatan kapastias Sumber Daya Manusia bidang perencanaan di setiap OPD dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender serta PPRG di OPD;
- c. Meneliti dan memastikan pengintegrasian Pengarusutamaan Gender dalam penyusunan RPJMD, Rencana Strategis OPD, RKPD dan Rencana Kerja OPD;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender serta PPRG di OPD;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada OPD dalam pelaksanaan percepatan Pengarusutamaan Gender melalui PPRG;
- f. Meneliti dokumen PPRG sebagai lampiran di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA;
- g. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh OPD mengenai Pengarusutamaan Gender dan PPRG;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo melalui Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Situbondo.

2. Pokja PUG

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/283/P/004.2/2019 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Situbondo.

Adapun tugas tim pokja PUG adalah :

- a. Mempromosikan dan memfasilitasi pengarusutamaan gender pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- c. Menyusun program kerja setiap tahun;
- d. Mendorong terwujudnya anggaran yang berprespektif gender;
- e. Menyusun rencana kerja kelompok kerja pengarusutamaan gender setiap tahun;
- f. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- g. Memfasilitasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender Kabupaten Situbondo;
- h. Melakukan pemantauan pelaksanaan pangarusutamaan gender pada masing-masing OPD;
- i. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- j. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender;
- k. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing OPD;
- l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

3. Focal Poin PUG

Di setiap Perangkat Daerah, telah dibentuk dan ditetapkan Focal Point PUG, yang masing-masing ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Adapun tugas Focal Poin PUG adalah :

- a. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
- b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran yang responsive gender;

- c. Melaksanakan advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan unit kerja;
- d. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;
- e. Memfasilitas penyusunan data gender pada unit kerja;
- f. Melaporkan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada kepala OPD.

4. **Fasilitator PUG**

Adanya fasilitator PUG Kabupaten yang telah mengikuti “*Training of Fasilitator PUG/PPRG Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*”.

4.4. **Penguatan Peran serta Masyarakat**

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat ini tergambar jelas pada **SINERGI (Situbondo Inklusi Terintegrasi)**, yang merupakan wadah integrasi program pembangunan pemerintah daerah, yang meliputi Pemerintah Kabupaten/eksekutif, legislatif, Kecamatan, Desa/kelurahan, dunia usaha, perbankan, NGO.

4.5. **Matriks Rencana Aksi**

Berdasarkan isu gender pada bagian sebelumnya, maka dapat disusun rencana aksi daerah sebagaimana matrik terlampir. Rencana aksi daerah ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten dan OPD, yang masuk dalam RPJMD dan Renstra PD. Rencana aksi ini disusun untuk dapat menyelesaikan isu gender dan penyebabnya. Rencana aksi dikelompokkan berdasarkan identifikasi masalah dan kemudian dijabarkan dalam rencana aksi yang lebih terinci. Untuk memantau dan mengevaluasi apakah rencana aksi yang dilakukan telah berhasil mengurangi masalah, juga telah disusun indikator keberhasilan dari masing-masing rencana aksi.

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Situbondo Tahun 2020-2021 ini disusun untuk menjadi pedoman bagi unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo maupun pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan PUG.

Dengan adanya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender ini diharapkan percepatan pelaksanaan pembangunan responsif gender di Kabupaten Situbondo dapat terwujud, dan hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa adanya pengecualian, dengan menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, tumbuhnya pertumbuhan ekonomi, serta semakin terbuka dan mudahnya akses pendidikan dan kesehatan.

Rencana Aksi Daerah ini bersifat dinamis, dapat direview dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan situasi pembangunan di Kabupaten Situbondo. Diharapkan dengan adanya Rencana Aksi Daerah ini pelaksanaan PUG di Kabupaten Situbondo dapat berkontribusi lebih besar dalam mengurangi kesenjangan gender di Indonesia.

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

Tabel 4.2.
Matriks Realisasi Target Pengarusutamaan Gender Kabupaten Situbondo
Tahun 2016-2019

ISU GENDER	RENCANA AKSI PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	REALISASI TARGET				PELAKSANA
					2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
Bid. Kesehatan Masih tingginya angka kematian ibu hamil dan melahirkan; Masih rendahnya proporsi persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih; Masih rendahnya kunjungan K4 ; Masih rendahnya jumlah ibu hamil yang mendapat imunisasi yang dapat mengurangi resiko kematian ibu dan juga kematian bayi; Kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi (Unmetneed); Rendahnya partisipasi laki-laki dalam program KB. Semakin bertambahnya jumlah penyandang HIV/AIDS	Program Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Penurunan AKI	prosentase posyandu Purnama Mandiri	61,13%	71,40%	76,51%	75,40%	Dinkes
			Penurunan AKB	Jumlah sosialisasi, bintek dan pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan gizi masyarakat	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	
			Prevalensi Gizi Buruk	Jumlah Sasaran Masyarakat yg mendapatkan PMT (KEK, Gizi Buruk, Gizi Kurang)	Kek 1261 Gizi Buruk 261 Gizi Kurang 3144	Kek 1342 Gizi Buruk 170 Gizi Kurang 2560	Kek 1493 Gizi Buruk 131 Gizi Kurang 2433	Kek 1554 Gizi Buruk 151 Gizi Kurang 357	
			Peningkatan Upaya Kesehatan Lingkungan	Jumlah sosialisasi, bintek dan pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan kesehatan lingkungan	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	
			Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak dan Lansia	Jumlah sosialisasi, bintek dan pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan kesehatan ibu dan Anak balita dan Sekolah dan lansia	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	
				prosentase sasaran masyarakat KIA yang dilayani	85%	90%	92,01%	94,40%	
	Program Sumber Daya Kesehatan	Pembinaan dan Pelatihan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Yang Memenuhi Standar Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah	Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi melalui bintek , sosialisasi dan pelatihan	601 Nakes	426 nakes	713 Nakes	1252 nakes	Dinkes
				Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	10 PKM	10 PKM	10 PKM	10 PKM	

1	ISU GENDER	2	RENCANA AKSI PROGRAM	3	KEGIATAN	4	OUTCOME	5	INDIKATOR OUTPUT	6	2016	7	2017	8	2018	9	2019	10	PELAKSANA	
					Peningkatan Pembinaan Kesehatan dan Pembiayaan Penduduk Miskin	Prosentase penduduk Miskin yang terlayani JKN	Jumlah Maskin SPM yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Peningkatan Upaya obat dan Alat Kesehatan		Jumlah masyarakat miskin yg dibayarkan premi terintegrasi JKN	2.893 org	2.878 org	2.859 org	3.1097 org									
							Jumlah Pembinaan, bimtek dan pengawasan makanan dan minuman serta PIRT	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali									
							Prosentase terbelinya alkes yang dibeli dengan yang direncanakan	80%	85%	85%	90%									
							Prosentase sasaran masyarakat yang ditangani untuk penyakit menular	84%	86%	87%	89%									Dinkes
					Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular & Tidak Menular	Prosentase penemuan dan penderita penyakit Sumber binatang / zoonosis (DBD, malaria, Filariasis, dan cacangan)														
						Prosentase penemuan dan penanganan	Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali									
							prosentase sarana penunjang yang dibutuhkan oleh puskesmas	84%	80%	87%	90%									
							Jumlah sosialisasi. Bimtek, pelatihan yang dilakukan dalam penyakit tidak menular	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali									
							Prosentase UCI Imunisasi dasar lengkap													
							Prosentase Skrining Penyakit Degeneratif (hipertensi dan Diabetes Melitus)	Prosentase ODGJ yg ditangani	30,83%	40,17%	84,50%									
							Prosentase skrining Pengendalian Faktor Resiko PTM (Usia Produktif)													
							Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah dan Imunisasi	Jumlah sosialisasi. Bimtek yang dilakukan dalam surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah dan Imunisasi	10 kali	10 kali	10 kali									
							Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Jumlah Kasus KLB yang ditangani dan dilakukan	5 kasus	4 kasus	3 kasus	6 kasus								

ISU GENDER	RENCANA AKSI	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	PELAKSANA		
1	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	OUTPUT	TARGET	TARGET	12		
2	3	4	5	6	7	8	9		
	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan primer dan Kestrad	Prosentase puskesmas dan Rumah Sakit yang	Prosentase sasaran yg diminusi	96,18%	87,61%	89,90%	89,80%	Dinkes
			Prosentase pelayanan rujukan sesuai dengan standart	Jumlah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat	118	118	118	557	
		Peningkatan pelayanan rujukan dan penanggulangan masalah kesehatan		Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan layanan	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali	
		Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas Beserta Jaringannya		Jumlah penanganan masalah kesehatan yang ditangani	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	
			Jumlah Puskesmas dan Rumah SAKIT yang melakukan IKM sesuai standar	Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Beserta Jaringannya	17 PKM & 3 RSU	17 PKM & 3 RSU	17 PKM & 3 RSU	20 PKM & 3 RSU	
				Jumlah Puskesmas yang terakreditasi, sertifikasi akreditasi	terakreditasi 11 PKM	terakreditasi 17PKM	terakreditasi 15 PKM sertifikasi	terakreditasi 9 PKM & 1 Lab Kesda	
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Penyediaan / Peningkatan / pemeliharaan sarana dan	Prosentase terukupinya sarana prasarana sesuai standar	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki	100%	100%	100%	100%	Dinkes dan 3 RSU
	Program Pelayanan Pelayanan Rumah Sakit	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Prosentase Pelayanan RS yang sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal) Rumah	Jumlah Penyuluhan dan Jumlah Media Informasi yang diberikan ke Masyarakat	1 unit	96 kali	96 kali dan 5000 media penyuluhan	96 kali dan 5000 media penyuluhan	RSAR (Target 2020 dan 2021 merupakan gabungan 3 RSU)
		Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit		Jumlah gedung yang dibangun dan direhab	1 unit	1 unit	3 unit	0 unit	

1	ISU GENDER	2	RENCANA AKSI PROGRAM KEGIATAN	3	4	INDIKATOR OUTCOME	5	6	2016	7	2017	8	2018	9	2019	PELAKSANA
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit			Jumlah Unit Pelayanan RS yang mencapai standar SPM	94 unit	10 unit	21 unit	10 unit	293 unit	10 unit	98 unit			
			Program Pelayanan Pelayanan Rumah Sakit	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Prosentase Pelayanan RS yang sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal) Rumah	Jumlah Penyuluhan dan Jumlah Media informasi yang diberikan ke Masyarakat					0	100%	0	100%		RS ASB
				Peningkatan Kenitraan Yankes		Prosentase Kegiatan Kenitraan peningkatan pelayanan kesehatan										
				Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit		Jumlah gedung yang dibangun dan direhab					2 unit		4 unit			
				Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit		Jumlah Unit Pelayanan RS yang mencapai standar SPM			5 unit				10 unit			
			Program Pelayanan Pelayanan Rumah Sakit	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Prosentase Pelayanan RS yang sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal) Rumah	Jumlah Penyuluhan dan Jumlah Media informasi yang diberikan ke Masyarakat					38 Media	45 Media	36 Media	-		RS BSK
				Peningkatan Kenitraan Yankes		Prosentase Kegiatan Kenitraan peningkatan pelayanan kesehatan					100%	100%	100%	100%		
				Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit		Jumlah gedung yang dibangun dan direhab					3 unit	2 unit	1 unit	0		
				Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit		Jumlah Unit Pelayanan RS yang mencapai standar SPM					1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		
			Program Keluarga Berencana dan Pembangunan	Peningkatan pelayanan Jaminan ber KB	Persentase peserta KB baru	Jumlah Peserta Peningkatan Jaminan ber KB	29 kali	25 kali			160 org	511 org			DPPKB	
				Pembinaan Kesertaan ber KB	Persentase peserta KB Baru MKJJP	Jumlah Peserta Pembinaan Kesertaan ber KB	62 kali	88 kali			2.380 org	2.453 org				
				Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Ketahanan	Persentase PUS anggota Tribina yang ber KB	Jumlah Peserta Pemberdayaan Keluarga	95 kali	76 kali			1.933 org	1.934 org				
					Persentase PUS anggota UPPKS yang ber KB											
			Program Pengendalian Penduduk dan Penggerakan KKBPK	Advokasi dan Penggerakan KKBPK	peningkatan kerja sama dengan mitra kerja dalam rangka penurunan	Jumlah pelaksanaan Advokasi	24 kali	40 kali			40 kali	40 kali	49 kali		DPPKB	

ISU GENDER	PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	REALISASI TARGET			PELAKSANA	
					2016	2017	2018		2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
		Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB dan Kader KB		Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB dan Kader	3 kali	27 kali	1.569 org	654 org	
		Pengolahan Data KKBPK		Jumlah Pengolahan Data KKBPK	4 kali	12 kali	161 org	136 org	
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase terbentuknya forum anak desa/keurahan	Jumlah peserta pengajian anak bersholawat		706 orang	706 orang	706 orang	DPPPA
		Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlindungan	Jumlah pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak		100%	100%	100%	DPPPA
		Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah		Jumlah peserta pelaksanaan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak di daerah		160 orang	0	160 orang	
		Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase kelompok dan organisasi perempuan yang diberdayakan	Jumlah peserta pembinaan organisasi perempuan		22 Organisasi perempuan	22 Organisasi perempuan	22 Organisasi perempuan	DPPPA
		Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan		Jumlah peserta pendidikan dan peatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan		327 orang	327 orang	327 orang	
		Gerakan Sayang Ibu (GSI)		Jumlah peserta gerakan sayang ibu (gsi)		35 satgas, 17 kec	35 satgas, 17 kec	6 kecamatan	
		Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak		Jumlah peserta penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak		112 orang	112 orang	112 orang	
		Program PAUD dan Dikmas	APK PAUD 4-6 th	Jumlah lembaga PAUD	109,92%	106,37%	111,18%	111,81%	Dikbud
		Pembinaan kelembagaan DIKMAS	Persentase angka melek huruf usia 15 s.d 59 tahun (tidak	Jumlah lembaga DIKMAS	93,44%	92,80%	95,15%	93,94%	
		Penyediaan sarana dan prasarana PAUD dan DIKMAS		Jumlah sarana dan prasarana PAUD dan DIKMAS	6 lembaga	4 lembaga	6 lembaga	17 lembaga	
		Pembinaan kelembagaan SD	APK SD/MI	Jumlah lembaga SD	99,91%	95,36%	102,63%	103,02%	Dikbud

Bidang Pendidikan
 Masih rendahnya rata-rata lama sekolah;
 Pada APK jenjang pendidikan SLTA sederajat terdapat kesenjangan gender ditunjukkan dengan indeks paritas gender untuk APK pada jenjang pendidikan SLTA
 Masih belum tercapainya target SDGs untuk APK jenjang pendidikan

ISU GENDER	RENCANA AKSI PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	REALISASI TARGET			2019	PELAKSANA	
					2016	2017	2018			
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	
SD/MT dan SLTP/MTS; Terdapat kesenjangan gender pada tingkat partisipasi penduduk dalam menempuh pendidikan di sekolah menengah atas, dimana partisipasi penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki; Terdapat kesenjangan gender dengan indeks paritas gender. Hal ini menunjukkan pada usia 13-15 tahun, laki-laki lebih banyak putus sekolah dibandingkan dengan perempuan; Angka melek huruf masih belum mencapai target SDCs yang dicantumkan Rendahnya angka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi		Pembinaan Kembangan SMP	APK SMP/MTs	Jumlah lembaga SMP	102,84%	107,68%	105,34%	105,98%		
		Penyediaan sarana dan prasarana SD dan SMP	APM SD/MI	Jumlah sarana dan prasarana SD dan SMP	88,19%	84,02%	91,32%	91,48%		
			APM SMP/MTs		76,70%	79,35%	80,14%	80,47%		
			APS SD/MI		0,11%	0,11%	0,06%	0,17%		
			APS SMP/MTs		0,27%	0,49%	0,65%	0,97%		
			ANGKA LULUSAN SD/MI		100%	100%	100%	100%		
			ANGKA LULUSAN SMP/MTS		99,94%	100%	100%	100%		
			AM SD/MI KE SMP/MTS		131,50%	132,32	99,64%	114,38%		
			AM SMP/MTS KE SM		104,15%	84,24	74,50%	118,69%		
			Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah PTK PAUD dan DIKMAS		48,81%	53,77%	52,69%	52,47%	Dikbud
			Pembinaan PTK SD	Jumlah PTK SD		83,70%	84,94%	85,67%	86,36%	
		Pembinaan PTK SMP	Jumlah PTK SMP		74,39%	75,06%	75,51%	74,84%		
			Persentase Guru TK		33,78%	36,21%	36,77%	37,69%		
			Persentase Guru SD		34,42%	36,75%	39,19%	41,82%		
			Persentase Guru SMP yang bersertifikat		81,06%	78,87%	76,39%	71,96%		
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Koleksi, pelestarian dan pengelolaan bahan pustaka	Bedah Buku	-	-	30 orang	35 orang	Perpustakaan	
				Jumlah menulis cerpen	-	-	-	37 orang		
				Jumlah peserta lomba cerpen	-	-	-	-		
				Jumlah kunjungan perpustakaan keliling yang dilaksanakan	40 kunjungan	40 kunjungan	40 kunjungan	70 kunjungan		
				Jumlah layanan perpustakaan yang dilaksanakan	229 hari	310 hari	305 hari	300 hari		
				Jumlah jenis lomba yang diadakan	3 lomba	3 lomba	3 lomba	3 lomba		

1	ISU GENDER	PROGRAM	RENCANA AKSI KEGIATAN	INDIKATOR	OUTPUT	REALISASI TARGET				PELAKSANA
						2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	
Bidang Ketenagakerjaan Terjadi kesenjangan gender pada angkatan kerja ; Tingkat pengangguran terbuka termasuk kategori kecil. Indeks paritas gender untuk pengangguran terbuka menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan gender dalam jumlah pengangguran; Terdapat kesenjangan gender pada peduduk yang bekerja dengan indeks paritas gender untuk penduduk bekerja. Jumlah penduduk yang bekerja lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan.	Program Penyelesaian dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Pembinaan Kearsipan	Persentase PD yang pengelolaan arsip dinamis dan statis	Jumlah pengelola kearsipan yang mendapatkan pembinaan	43 orang	43 orang	83 orang	57 orang	Perpustakaan	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih keterampilan kerja	84 org	104 org	174 org	120 org	Tenaga Kerja	
		Pelatihan Persiapan Peserta Program Magang		Jumlah pencari kerja yang dimanggakan	0 org	0 org	0 org	25 org		
		Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah pencari kerja yang dilatih keterampilan kerja	36 org	42 org	111 org	96 org		
		Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	persentase pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang mendapat informasi bursa tenaga kerja	100 org	35 org	50 org	50 org	Tenaga Kerja	
		Penerapan Teknologi Padat Karya (TPK)		Jumlah pencari kerja yang dilatih Teknologi Padat Karya	30 org	30 org	30 org	15 org		
		Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang terlatih		Jumlah kelompok yang terlatih dibentuk dan diberdayakan	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	5 kelompok		
		Promosi Produk Unggulan yang terlatih		Jumlah promosi produk unggulan terlatih	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali		
		Penyelenggaraan Job Fair (Bursa tenaga kerja, transmigrasi, pengawasan dan hubungan industrial)		Jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan Job Fair (Bursa tenaga kerja, transmigrasi, pengawasan dan hubungan industrial)	40 perusahaan	40 perusahaan	40 perusahaan	40 perusahaan		
		Sosialisasi UMK dan Monitoring Syarat-Syarat Kerja		Jumlah peserta Sosialisasi UMK dan Monitoring Syarat-Syarat Kerja yang diadakan	50 org	50 org	50 org	50 org	Tenaga Kerja	
		Sosialisasi Hubungan Industrial		Jumlah peserta Sosialisasi hubungan industrial yang diadakan	61 org	61 org	61 org	61 org		
	Bidang Ekonomi Belum tersedianya data terpilih gender untuk jumlah anggota koperasi	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	30 orang	40 orang	-	-	Dinkop dan UM	

ISU GENDER	RENCANA AKSI PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	2016	2017	REALISASI TARGET	2018	2019	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	
laki-laki dan perempuan, serta perkembangannya minimal untuk 5 (lima) tahun terakhir pada usaha industri kecil dan menengah yang ada		Pertumbuhan jiwa enterprenur koperasi melalui Bimtek kewirausahaan koperasi		jumlah anggota koperasi yang mengikuti kegiatan pertumbuhan jiwa enterprenur ml Bimtek kewirausahaan koperasi	45 orang	-	-	-	-	
Belum tersedianya data terpih gender untuk jumlah pekerja laki-laki dan perempuan, serta perkembangannya minimal untuk 5 (lima) tahun terakhir pada usaha industri kecil dan menengah yang ada		Pembinaan Bina Usaha Koperasi Ritel dan Pelaporan keuangan		Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti Pembinaan Bina Usaha Koperasi Ritel dan Pelaporan keuangan	45 orang	90 orang	-	-	-	
Rendahnya partisipasi perempuan dalam keanggotaan koperasi		Pembinaan Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Ritel		Jumlah koperasi terbina yang memiliki pengembangan usaha di sektor ritel	-	-	25 koperasi	-	-	Dinkop dan UM
Rendahnya kemampuan manajemen usaha dagang kecil dan menengah yang sebagian besar diikuti oleh perempuan		Pelatihan Peran Koperasi Wanita	Persentase peningkatan volume usaha KSP/USP	Jumlah kopwan yang mengikuti kegiatan pelatihan	-	-	30 koperasi	80 koperasi	-	
		Pembinaan Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Ritel		Jumlah koperasi terbina yang memiliki pengembangan usaha di sektor ritel	-	-	25 koperasi	130 koperasi	-	
		Runtisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi		Jumlah koperasi terbina yang menerapkan teknologi sederhana/ manajemen modern	-	-	-	30 koperasi	-	
		Bimtek Analisa Pemberian Kredit bagi KSP/USP Koperasi		Jumlah KSP/ USP yang mengikuti Bimtek	-	-	-	-	-	
		Pembinaan dan Pengembangan Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjaman Koperasi		Jumlah koperasi terbina dalam rangka peningkatan pembiayaan dan usaha simpan pinjaman	-	-	-	-	-	
		Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	Persentase usaha mikro mandiri/ bankable	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	160 orang	100 orang	-	-	-	Dinkop dan UM
		Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan produksi	Jumlah pengusaha mikro yang mengikuti kegiatan kemitraan	140 orang	-	-	-	-	

ISU GENDER	RENCANA AKSI PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	REALISASI TARGET				PELAKSANA
					2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
		Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Program Serifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)	Persentase jumlah peserta pelatihan yang konsisten menjalankan usaha pasca pelatihan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti sosialisasi dan monev SHAT	140 orang	50 orang	250 orang	500 orang	
		Pengembangan Sarana, Kemiraan dan Pemasaran Usaha Mikro	Persentase pengusaha mikro yang menghasilkan produk makanan & minuman	Jumlah pelaku Usaha Mikro yang diintervensi dalam pengembangan sarana, kemiraan dan pemasarannya	-	-	-	-	
		Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro		Jumlah pameran/ promosi yang diikuti dlm rangka pemasaran produk usaha mikro	-	-	3 lokasi	6 lokasi	
		Facilitasi Pengembangan usaha mikro		Jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengembangan usaha mikro	-	-	40 orang	50 orang	
		Pengembangan Manajemen dan Informasi Bisnis		Jumlah pelaku Usaha Mikro terbina dalam pengembangan manajemen dan informasi bisnis	-	-	-	-	
		Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan		Jumlah wirusaha baru/ pemula yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dalam rangka mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, menambah pendapatan keluarga	180 orang	105 orang	270 orang	370 orang	
		Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan		Jumlah wirusaha baru terbina dalam pengembangan skillnya	-	-	-	-	
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Jumlah WUB yang mengikuti kegiatan agar mampu menaikkan omzet penjualan produk	465 orang	435 orang	-	-	Dinkop dan UM
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	60 orang	145 orang	-	-	Dinkop dan UM
		Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis usaha koperasi		Jumlah koperasi terbina yang menerapkan teknologi sederhana/ manajemen modern	60 orang	145 orang	-	-	Dinkop dan UM

ISU GENDER

PROGRAM

KEGIATAN

OUTCOME

OUTPUT

2016

2017

2018

2019

PELAKSANA

RENCANA AKSI	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	PELAKSANA	
Pembinaan koperasi wanita dalam rangka pengembangan usaha koperasi Pelatihan peran koperasi wanita syariah Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD Bimtek Peningkatan kapasitas anggota koperasi sebagai kader koperasi Bimtek revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi Pembinaan Kelembagaar dan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi	Persentase Koperasi Aktif Jumlah pengurus kopwan yang mengikuti kegiatan pembinaan dan rangka pengembangan koperasi Jumlah kopwan yang mengikuti kegiatan pelatihan Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen pengelolaan koperasi Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas anggota koperasi Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek yang perlu mengalami revitalisasi kelembagaan Jumlah pengurus/ anggota koperasi yang memperoleh pembinaan kelembagaan serta peningkatan kapasitas SDM koperasi	70 orang	100 orang	-	-	-	
	Pembinaan, pengawasan, dan deheraraan koperasi Penilaian Kesehatan bagi KSP/USP Koperasi Peningkatan pengawasan bagi pengurus koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan deheraraan Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek audit laporan keuangan	40 koperasi	70 koperasi	50 koperasi	50 koperasi	-
	Peningkatan pengawasan bagi pengurus koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek audit laporan keuangan	-	25 koperasi	-	60 koperasi	-
	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah calon wirasaha baru yang dibina dengan pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja	-	-	680 orang	680 orang	Dinkop dan UM
	Persentase masyarakat/ calon WUB yang dibina menjadi wirasaha	Jumlah calon wirasaha baru yang dibina dengan pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja	-	-	680 orang	680 orang	Dinkop dan UM
	Jumlah koperasi yang mengikuti kegiatan pelatihan	Jumlah kopwan yang mengikuti kegiatan pelatihan	40 orang	40 orang	-	-	-
	Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian	45 orang	125 orang	160 orang	325 orang	-
	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen pengelolaan koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen pengelolaan koperasi	-	-	50 orang	60 orang	-
	Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas anggota koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas anggota koperasi	15 koperasi	60 koperasi	35 koperasi	100 koperasi	-
	Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek yang perlu mengalami revitalisasi kelembagaan	Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek yang perlu mengalami revitalisasi kelembagaan	45 koperasi	25 koperasi	100 koperasi	60 koperasi	-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12



ISU GENDER	RENCANA AKSI	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	OUTPUY	2016	2017	REALISASI TARGET	2018	2019	PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Bina Usaha Perdagangan	Bina Promosi dan Pengembangan Ekspor	Persentase jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan produksi	Jumlah event pameran yang diikuti dalam rangka Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat melalui Fasilitasi Pameran Produk Usaha Mikro Kecil Tingkat Lokal maupun Nasional	Jumlah Pelaku Usaha Online dan Konvensional yang dibina	-	-	-	-	-	Disperdagin	
		Bina Usaha Perdagangan	Bina Promosi dan Pengembangan Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Berorientasi Ekspor	Jumlah Produk Usaha yang dipromosikan dan pelaku usaha yang dibina	Jumlah Pelaku Usaha Online dan Konvensional yang dibina							
			Temu usaha dan kontak dagang		Jumlah komoditi yang dibawa dikegiatan temu usaha dan kontak dagang					16 komoditi	20 komoditi		
			Pasar Murah		Jumlah komoditi barang yang dibawa ke pasar murah					15 komoditi	15 komoditi		
			Monitoring harga sembako dan barang penting lainnya ditingkat pengecer		Jumlah pelaksanaan monitoring sembako dipasar rakyat					13 Pasar	13 pasar		
			Monitoring realisasi ekspor impor		Jumlah komoditi ekspor impor					6 Komoditi	8 komoditi		
			Pameran produk dan kerajinan dan industri rumah tangga		Jumlah usaha mandiri masyarakat yang terfasilitasi promosinya					10 komoditi	20 IKM		
			Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan		Jumlah pedagang kaki lima yang dibina secara berkala					50 PKL	50 PKL	Disperdagin	
			Diversifikasi produk olahan pangan		Jumlah IKM yang dilatih					100 IKM	275 IKM	275 IKM	Disperdagin

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
ISU GENDER	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	2016	REALISASI TARGET	2018	2019	PELAKSANA
1	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Bidang Industri)	Pembinaan dan Pelatihan keterampilan kerja dan masyarakat melalui pelatihan berbasis Aneka dan		Jumlah tenaga kerja yang meningkatkan kualitas skil individunya bidang aneka dan tekstil		50 IKM	250 IKM	250 IKM	Disperdagin
		Pembinaan dan Pelatihan keterampilan kerja dan masyarakat melalui pelatihan berbasis Agro dan kimia		Jumlah tenaga kerja yang meningkatkan kualitas skil individunya bidang agro dan kimia		100 IKM	255	255	
		Peningkatan peranan wanita dalam industri kecil		Jumlah Peserta pelatihan peningkatan peranan wanita dalam industri kecil		50 Peserta			
	Program Pembinaan Lingkungan sosial (Bidang Pasar)	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan /atau Jembatan, Pasar dan sarana Prasarana Pendukung Parwisata melalui Pembangunan Pasar	Jumlah Fasilitas umum pasar yang terbangun menuju pasar ber SNI	Jumlah los dan kios yang terbangun				20 Kios dan 30 los	Disperdagin
		Pembangunan/ Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan/atau Jembatan, Pasar dan sarana Prasarana Pendukung Parwisata melalui Rehab Pasar Rakyat		Jumlah sarana kelengkapan pasar yang terbangun					
		Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat		Jumlah tenaga kerja yang meningkatkan kualitas skil individunya					

ISU GENDER	RENCANA AKSI		INDIKATOR	REALISASI TARGET				PELAKSANA	
	PROGRAM	KEGIATAN		2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
ini terlihat dari jumlah jaksa, polisi, dan hakim yang		Pendidikan dan pelatihan fungsional dan sertifikasi kompetensi		Jumlah peserta yang lulus diklat fungsional & sertifikasi kompetensi	590 org	675 org	705 org	690 org	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pengembangan karier ASN	Persentase penempatan pegawai ASN sesuai Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan karir	7440 org	7103 org	6844 org	6920 org	Bkpsdm
		Pembinaan disiplin pegawai		Jumlah permasalahan ASN yang ditangani	1804 org	1608 org	1890 org	1908 org	
		Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS		Jumlah PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun	11589 org	12557 org	13407 org	13854 org	
		Penyusunan kebutuhan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara		Jumlah pengadaan dan kebutuhan Aparatur Sipil Negara	500 org	500 org	750 org	800 org	
	Program Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah dan Risalah	Pembahasan rancangan peraturan daerah non APBD	Prosentase raperda inisiatif DPRD yang disahkan	Jumlah kegiatan pembahasan raperda	17 perda	20 perda	20 perda	20 perda	Set DPRD
		Fasilitasi kegiatan Rapat dan peningkatan SDM Pimpinan dan anggota DPRD		Jumlah Rapat dan Risalah	32 rapat	32 rapat	32 rapat	35 rapat	
	Program Fasilitasi Fungsi Pengawasan, Penganggaran dan Alat Kelengkapan Dewan	Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran	Prosentase rumusan kebijakan hasil kunjungan kerja yang ditindaklanjuti	Jumlah Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran					Set DPRD
		Fasilitasi Alat Kelengkapan Dewan		Jumlah Fasilitasi Alat Kelengkapan Dewan	132 rapat	144 rapat	144 rapat	144 rapat	
		Fasilitasi Tenaga Ahli Fraksi DPRD		Jumlah ketersediaan tenaga ahli fraksi	7 org	7 org	7 org	7 org	
		Workshop/Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD		Jumlah pelaksanaan Workshop/Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD	45 org / 8 kl				
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh		Jumlah pelaksanaan kegiatan hearing dialog	6 hearing / dialog	6 hearing / dialog	6 hearing / dialog	12 hearing / dialog	Set DPRD

ISU GENDER	RENCANA AKSI		INDIKATOR	REALISASI TARGET			PELAKSANA		
	PROGRAM	KEGIATAN		2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
			OUTCOME	OUTPUT					
	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentrangan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Fisik Anggota Satpol PP	Prosentase Ketertiban Umum dan Ketentrangan Masyarakat	Jumlah Pembinaan Fisik dan Samapta Pol. PP	-	-	88 kali	-	Satpol PP
		Lomba Kesamaptaan se Provinsi Jawa Timur		Jumlah Peserta Upacara HUT Satpol PP Se Jawa Timur	45 org	0 org	71 org	35 org	
		Hari Jadi Satpol PP dan Linmas Kabupaten Jambore		Jumlah Peserta Upacara Satpol PP dan Linmas	500 org	500 org	750 org	600 org	
		Jambore Satpol PP		Jumlah peserta Jambore	35 org	0 org	18 org	24 org	
	Program Penegakan Perundangundangan Daerah dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Pengawalan Pejabat VVIP dan Pejabat Daerah	Prosentase Kasus Pelanggar Perda yang disidik	Jumlah Pengawalan yang dilaksanakan				15 org	Satpol PP
		Sosialisasi Perda 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentrangan Masyarakat		Jumlah peserta sosialisasi					
		Operasi Pembinaan PNS dan Siswa		Jumlah pelaksanaan Operasi Pembinaan PNS dan Siswa		35 kali	20 kali		
		Operasi Tim KOPELTIBKAB		Jumlah pelaksanaan Operasi Tim KOPELTIBKAB dan Pemulangan, Tipiring	43 kali	43 kali	43 kali		
		Pemulangan dan Pengiriman Pelanggar Perda		Jumlah pelaksanaan Pemulangan dan Pengiriman Pelanggar Perda	125 org			23 org	
		Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman keras dan Narkoba		Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang Peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba		30 org	40 org	100 org	
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Peningkatan Kemampuan Dasar Bagi Satgas Linmas Kecamatan dan Desa	Prosentase Anggota linmas yang terlatih	Jumlah kegiatan peningkatan kemampuan dasar bagi satgas linmas kec. dan desa	60 kegiatan	60 kegiatan	60 kegiatan	60 kegiatan	Satpol PP
		Peningkatan Kemampuan Pam Swakarsa Bagi Satgas Linmas dan Tokoh		Jumlah peserta pelaksanaan Pelatihan	60 org				

ISU GENDER	RENCANA AKSI			INDIKATOR	REALISASI TARGET			PELAKSANA			
	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME		2016	2017	2018		2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	Prosentase pembangunan drainase kabupaten dalam kondisi baik	Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara yang mendukung Pendidikan, Kesehatan, Pertumbuhan ekonomi sektor akomodasi dan Investasi daerah	62 m	2.275 m	10.172 m	10.840 m			DPUPR
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Prosentase pengembangan sumber daya air dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara yang mendukung pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	6.920 m	11.865 m	5.192,32 m	3.827 m			DPUPR
	Program Penyediaan Prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat	Rehabilitasi/pemeliharaan saluran sungai		Panjang saluran sungai yang dinormalisasi	-	4.274 m	4.901,07 m	1.553 m			
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat	Prosentase pengelolaan air minum di daerah rawan air	Panjang spam yang terbangun dan terpelihara yang mendukung yang mendukung Kesehatan dan Pertumbuhan ekonomi sektor akomodasi dan Investasi daerah	-	-	36.712 m	38.347 m			DPUPR
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Prosentase jalan lingkungan yang terbangun	Panjang jalan lingkungan yang dibangun	-	-	681 m	-			DPUPR
	Program Pengendalian Banjir	Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan		Panjang jalan lingkungan yang terpelihara	-	-	568 m	1.010 m			
	Program Pengendalian Banjir	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Prosentase terkendalinya bantaran sungai dari banjir	Panjang bantaran dan tanggul sungai yang direhab dan dipelihara	2.690 m	720,20 m	784,1 m	5.501 m			DPUPR
	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Masyarakat Kurang Mampu	Persentase Rumah Tidak Layak Huni menjadi Layak Huni	Jumlah rumah layak huni yang ditangani	4205 unit	4965 unit	5636 unit	6642 unit			DPKP
	Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Perumahan	Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar	Persentase perumahan dan permukiman yang lingkungannya sehat	Jumlah pemanfaatan sanitasi dasar	56405 kk	58504 kk	58743 kk	62167 kk			DPKP
				Luas kawasan kumuh yang ditangani	0	105.66 ha	80.10 ha	80.10 ha			
				Luas jalan lingkungan di perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun	0	19.558 m2	22.825 m2	26.969 m2			

ISU GENDER	RENCANA AKSI		INDIKATOR	REALISASI TARGET					PELAKSANA
	PROGRAM	KEGIATAN		OUTCOME	OUTPUT	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
	Program Pengelolaan Lingkungan Perkotaan	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan	Persentase taman yang dibangun	Luas taman yang dibangun	10.203 m2	14.484 m2	38.984 m2	59.405 m2	DPKP
			Persentase penerangan jalan umum yang dibangun	Jumlah PJU yang terpasang	922 titik	1271 titik	1586 titik	2449 titik	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan		Luas taman yang dipelihara	10.203 m2	14.484 m2	38.984 m2	59.405 m2	DPKP
				Jumlah PJU yang dipelihara	922 titik	1271 titik	1586 titik	2449 titik	

Tabel 4.3.
**MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN SITUBONDO
 TAHUN 2020-2021**

ISU GENDER 1	RENCANA AKSI		INDIKATOR		TARGET		PELAKSANA	
	PROGRAM 2	KEGIATAN 3	OUTCOME 4	OUTPUT 5	2020 10	2021 11		
Bid. Kesehatan Masih tingginya angka kematian ibu hamil dan melahirkan; Masih rendahnya proporsi persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih; Masih rendahnya kunjungan K4 ; Masih rendahnya jumlah ibu hamil yang mendapat imunisasi yang dapat mengurangi resiko kematian ibu dan juga kematian bayi; Kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi (Unmetneed); Rendahnya partisipasi laki-laki dalam program KB. Semakin bertambahnya jumlah penyandang HIV/AIDS	Program Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan	Penurunan AKI	prosentase posyandu Purnama Mandiri	80%	82%	Dinkes	
		Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Penurunan AKB	Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan gizi masyarakat	20 kali	20 kali		
			Prevalensi Gizi Buruk	Jumlah Sasaran Masyarakat yg mendapatkan PMT (KEK, Gizi Buruk, Gizi Kurang)	Kek 1400, Gizi Buruk 180, Gizi kurang 393	Kek 1402, Gizi Buruk 190, Gizi kurang 393		
		Peningkatan Upaya Kesehatan Lingkungan		Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan kesehatan lingkungan	20 kali	20 kali		
		Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak dan lansia		Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan kesehatan ibu dan Anak balita dan Sekolah dan lansia	20 kali	20 kali		
				prosentase sasaran masyarakat KIA yang dilayani	80%	80%		
		Program Sumber Daya Kesehatan	Pembinaan dan Pelatihan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Yang Memenuhi Standar Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah	Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi melalui bimtek , sosialisasi dan pelatihan	495 nakes	524 nakes	Dinkes
				Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	10 PKM	17 PKM		

ISU GENDER 1	RENCANA AKSI PROGRAM		KEGIATAN 3	OUTCOME 4	INDIKATOR OUTPUT 5	TARGET		PELAKSANA 12
	2	2				2020 10	2021 11	
		Peningkatan Pembiayaan Kesehatan dan Pembiayaan Penduduk Miskin		Prosentase penduduk Miskin yang terlayani JKN	Jumlah Maskin SPM yang terlayani	100%	100%	
		Peningkatan Upaya obat dan Alat Kesehatan			Jumlah masyarakat miskin yg dibayarkan premi terintegrasi JKN	23.000 org	23.000 org	
					Jumlah Pembinaan , bimtek dan pengawasan makanan dan minuman serta PIRT	30 kali	30 kali	
					Prosentase terbelinya alkes yang dibeli dengan yang direncanakan	90%	90%	
	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular & Tidak Menular		Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Prosentase penemuan dan penanganan penderita penyakit Sumber binatang / zoonosis (DBD, malaria, Filariasis, dan cacangan)	prosentase sasaran masyarakat yang ditangani untuk penyakit menular	91%	92%	Dinkes
				Prosentase penemuan dan penanganan	Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan	10 kali	10 kali	
					prosentase sarana penunjang yang dibutuhkan oleh puskesmas	91%	92%	
			Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Prosentase UCI Imunisasi dasar lengkap	Jumlah sosialisasi. Bimtek, pelatihan yang dilakukan dalam penyakit tidak menular	8 kali	8 kali	
				Prosentase Skrening Penyakit Degeneratif (hipertensi dan Diabetes Melitus)	Prosentase ODGJ yg ditangani	100%	100%	
			Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah dan Imunisasi	Prosentase skrening Pengendalian Faktor Resiko PTM (Usia Produktif)	Jumlah sosialisasi. Bimtek yang dilakukan dalam surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah dan Imunisasi	10 kali	10 kali	
					Jumlah Kasus KLB yang ditangani dan dilakukan	3 kasus	3 kasus	

ISU GENDER 1	RENCANA AKSI		INDIKATOR		TARGET		PELAKSANA
	PROGRAM 2	KEGIATAN 3	OUTCOME 4	OUTPUT 5	2020 10	2021 11	
	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Peningkatan pelayanan Kesehatan primer dan Kestrad	Prosentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang	Prosentase sasaran yg diimunisasi	90%	90%	Dinkes
			Prosentase Puskesmas yg terstandarisasi	Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan layanan kesehatan pada masyarakat	35 kali	30 kali	
			Prosentase pelayanan rujukan sesuai dengan standart	Jumlah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat	110 org	110 org	
		Peningkatan pelayanan rujukan dan penanggulangan masalah kesehatan		Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan layanan rujukan kesehatan dan penanggulangan	25 kali	25 kali	
				Jumlah penanganan masalah kesehatan yang ditangani	10 kali	10 kali	
		Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas Berserta Jaringannya		Jumlah Puskesmas dan Rumah SAKIT yang melakukan IKM sesuai standar	20 PKM & 3 RSU	20 PKM & 3 RSU	
				Jumlah sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang dilakukan dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Berserta Jaringannya	20 kali	20 kali	
				Jumlah Puskesmas yang terakreditasi, resertifikasi akreditasi	9 PKM	9 PKM	
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Penyediaan / Peningkatan / pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas	Prosentase tercukupinya sarana prasarana sesuai standar	Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana yang diperbaiki	90%	90%	Dinkes dan 3 RSU
	Program Pelayanan Pelayanan Rumah Sakit	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Prosentase Pelayanan RS yang sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal) Rumah	Jumlah Penyuluhan dan Jumlah Media informasi yang diberikan ke Masyarakat	140 kali dan 1400 media penyuluhan	160 kali dan 3600 media penyuluhan	RSAR (Target 2020 dan 2021 merupakan gabungan 3 RSU)
		Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit		Jumlah gedung yang dibangun dan direhab	20 unit	15 unit	

ISU GENDER	RENCANA AKSI	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6
PROGRAM	INDIKATOR	OUTPUT	2020	2021	
			10	11	12
			Jumlah Alked		
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit		Jumlah Unit Pelayanan RS yang mencapai standar SPM	14 unit	16 unit
Program Pelayanan Pelayanan Rumah Sakit	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Prosentase Pelayanan RS yang sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal) Rumah	Jumlah Penyuluhan dan Jumlah Media informasi yang diberikan ke Masyarakat		RS ASB
	Peningkatan Kemitraan Yankes		Prosentase Kegiatan Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		
	Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit		Jumlah gedung yang dibangun dan direhab		
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit		Jumlah Unit Pelayanan RS yang mencapai standar SPM		
Program Pelayanan Pelayanan Rumah Sakit	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Prosentase Pelayanan RS yang sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal) Rumah	Jumlah Penyuluhan dan Jumlah Media informasi yang diberikan ke Masyarakat		RS BSK
	Peningkatan Kemitraan Yankes		Prosentase Kegiatan Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		
	Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit		Jumlah gedung yang dibangun dan direhab		
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit		Jumlah Unit Pelayanan RS yang mencapai standar SPM		
Program Keluarga Berencana dan Pembangunan	Peningkatan pelayanan Jaminan ber KB	Persentase peserta KB baru	Jumlah Peserta Peningkatan Jaminan ber KB	1200 org	DPPKB
	Pembinaan Kesertaan ber KB	Persentase peserta KB Baru MKJP	Jumlah Peserta Pembinaan Kesertaan ber KB	5000 org	
	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Ketahanan	Persentase PUS anggota Tribina yang ber KB	Jumlah Peserta Pemberdayaan Keluarga	3500 org	
		Persentase PUS anggota UPPKS yang ber KB			
Program Pengendalian Penduduk dan Penggerakan KKBPK	Advokasi dan Penggerakan KKBPK	peningkatan kerja sama dengan mitra kerja dalam rangka penurunan	Jumlah pelaksanaan Advokasi	96 kali	DPPKB

ISU GENDER 1	RENCANA AKSI KEHATIAN			INDIKATOR	TARGET		PELAKSANA
	PROGRAM 2	KEGIATAN 3	OUTCOME 4		OUTPUT 5	2020 10	
Bidang Pendidikan Masih rendahnya rata-rata lama sekolah; Pada APK jenjang pendidikan SLTA sederajat terdapat kesenjangan gender ditunjukkan dengan indeks paritas gender untuk APK pada jenjang pendidikan SLTA Masih belum tercapainya target SDGs untuk APK jenjang pendidikan SD/MI dan SLTP/MTs; Terdapat kesenjangan gender	Penyuluhan dan Peningkatan PKB dan Kader KB	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Peningkatan PKB dan Kader	5000 peserta	5000 peserta	5000 peserta	12	
	Pengolahan Data KKBPK	Jumlah Pengolahan Data KKBPK	12 kali	12 kali	12 kali		
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase terbentuknya forum anak desa/kelurahan	706 orang	706 orang	706 orang	DPPPA	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan	Persentase perempuan korban kekerasan yang	100%	100%	1	DPPPA	
		Jumlah peserta pelaksanaan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak di daerah	160 orang	160 orang			
	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase kelompok dan organisasi Perempuan yang diberdayakan	22 Organisasi perempuan	22 Organisasi perempuan	22 Organisasi perempuan	DPPPA	
		Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	327 orang	327 orang		
		Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Jumlah peserta gerakan sayang ibu (gsi)	-	-	35 satgas, 17 kec	
		Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah peserta penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	112 orang	112 orang		
	Program PAUD dan Dikmas	Pembinaan kelembagaan PAUD	APK PAUD 4-6 th	111.11%	111.41%	Dikbud	
		Pembinaan kelembagaan DIKMAS	Persentase angka melek huruf usia 15 s.d 59 tahun (tidak	95.64%	96.14%		
		Penyediaan sarana dan prasarana PAUD dan DIKMAS	Jumlah sarana dan prasarana PAUD dan DIKMAS	4 lembaga	11 lembaga		
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembinaan kelembagaan SD	APK SD/MI	95.89%	96.09%	Dikbud		

ISU GENDER 1	RENCANA AKSI PROGRAM 2	KEGIATAN 3	OUTCOME 4	INDIKATOR 5	TARGET		PELAKSANA 12	
					2020 10	2021 11		
pada tingkat partisipasi penduduk dalam menempuh pendidikan di sekolah menengah atas, dimana partisipasi penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki; Terdapat kesenjangan gender dengan indeks paritas gender. Hal ini menunjukkan pada usia 13-15 tahun, laki-laki lebih banyak putus sekolah dibandingkan dengan perempuan; Angka melek huruf masih belum mencapai target SDGs yang dicanangkan Rendahnya angka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi	Pembinaan kelembagaan SMP	Penyediaan sarana dan prasarana SD dan SMP	APK SMP/MTs	Jumlah lembaga SMP	105,53%	106,53%		
			APM SD/MI	Jumlah sarana dan prasarana SD dan SMP	84,59%	84,79%		
			APM SMP/MTs			81,27%	82,27%	
			APS SD/MI			0,09%	0,08%	
			APS SMP/MTs			0,28%	0,23%	
			ANGKA LULUSAN SD/MI			100%	100%	
			ANGKA LULUSAN SMP/MTS			100%	100%	
			AM SD/MI KE SMP/MTS			81,27%	100%	
			AM SMP/MTS KE SM			100%	100%	
	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Pembinaan PTK PAUD dan DIKMAS	Jumlah PTK PAUD dan DIKMAS		44,00%	45,00%	Dikbud	
		Pembinaan PTK SD	Jumlah PTK SD		76,68%	78,00%		
		Pembinaan PTK SMP	Jumlah PTK SMP		64,00%	65,00%		
			Persentase Guru TK		44,00%	45,00%		
			Persentase Guru SD		76,68%	78,00%		
			Persentase Guru SMP yang bersertifikat		64,00%	64,37%		
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Koleksi, pelestarian dan pengelolaan bahan pustaka		Persentase peningkatan jumlah pengunjung	Bedah Buku	-	-	Perpustakaan	
				Jumlah menulis cerpen	-	-		
				Jumlah peserta lomba cerpen	37 orang	-		
	Layanan otomasi, kerjasama, pembinaan dan pengembangan perpustakaan			Jumlah kunjungan perpustakaan keliling yang dilaksanakan	80 kunjungan	80 kunjungan		
				Jumlah layanan perpustakaan yang dilaksanakan	233 hari	233 hari		
	Pembinaan pengembangan tenaga perpustakaan			Jumlah jenis lomba yang diadakan	4 lomba	4 lomba		

ISU GENDER	RENCANA AKSI		INDIKATOR	TARGET		PELAKSANA	
	PROGRAM	KEGIATAN		OUTCOME	OUTPUT		2020
1	2	3	4	5	10	11	
Bidang Ketenagakerjaan Terjadi kesenjangan gender pada angkatan kerja ; Tingkat pengangguran terbuka termasuk kategori kecil. Indeks paritas gender untuk pengangguran terbuka menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan gender dalam jumlah pengangguran; Terdapat kesenjangan gender pada penduduk yang bekerja dengan indeks paritas gender untuk penduduk bekerja. Jumlah penduduk yang bekerja lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Pembinaan Kearsipan	Persentase PD yang pengelolaan arsip dinamis dan status	Jumlah pengelola kearsipan yang mendapatkan pembinaan	25 orang	50 orang	Perpustakaan 12
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih keterampilan kerja	84 org	84 org	Tenaga Kerja
		Pelatihan Pensiapan Peserta Program Magang		Jumlah pencari kerja yang dimagangkan	1 org	1 org	
		Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah pencari kerja yang dilatih keterampilan kerja	36 org	36 org	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	persentase pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang mendapat informasi bursa tenaga kerja	50 org	50 org	Tenaga Kerja
		Penerapan Teknologi Padat Karya (TPK)		Jumlah pencari kerja yang dilatih Teknologi Padat Karya	30 org	30 org	
		Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang terlatih		Jumlah kelompok yang terlatih dibentuk dan diberdayakan	3 kelompok	3 kelompok	
		Promosi Produk Unggulan yang terlatih		Jumlah promosi produk unggulan terlatih	2 kali	2 kali	
		Penyelenggaraan Job Fair (Bursa tenaga kerja, transmigrasi, pengawasan dan hubungan industrial)		Jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan Job Fair (Bursa tenaga kerja, transmigrasi, pengawasan dan hubungan industrial)	40 perusahaan	40 perusahaan	
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Sosialisasi UMK dan Monitoring Syarat-Syarat Kerja	persentase kasus ketenagakerjaan yang ditangani	Jumlah peserta Sosialisasi UMK dan Monitoring Syarat-syarat kerja yang diadakan	50 org	50 org	Tenaga Kerja
	Sosialisasi Hubungan Industrial		Jumlah peserta Sosialisasi hubungan industrial yang diadakan	61 org	61 org		
Bidang Ekonomi Belum tersedianya data terpilah gender untuk jumlah anggota koperasi laki-laki dan	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang	Facilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	-	-	Dinkop dan UM	

ISU GENDER	RENCANA AKSI	INDIKATOR	TARGET	PELAKSANA
1	2	3	4	5
PEREMPUAN, serta perkembangannya minimal untuk 5 (lima) tahun terakhir pada unit-unit koperasi yang ada;	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	2020
Belum tersedianya data terpilah gender untuk jumlah pekerja laki-laki dan perempuan, serta perkembangannya minimal untuk 5 (lima) tahun terakhir pada usaha industri kecil dan menengah yang ada	2	3	4	10
Rendahnya partisipasi perempuan dalam keanggotaan koperasi	2	3	4	11
Rendahnya kemampuan manajemen usaha dagang kecil dan menengah yang sebagian besar digeluti oleh perempuan	2	3	4	12
	Perumbuhan jiwa enterprenur koperasi melalui Bimtek kewirausahaan koperasi	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti kegiatan penumbuhan jiwa enterprenur ml Bimtek kewirausahaan koperasi	-	-
	Pembinaan Bina Usaha Koperasi Ritel dan Pelaporan keuangan	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti Pembinaan Bina Usaha Koperasi Ritel dan Pelaporan keuangan	-	-
	Pembinaan Bina Usaha Koperasi Ritel dan Pelaporan Keuangan	Jumlah koperasi usaha ritel yang dibina	-	Dinkop dan UM
	Pelatihan Peran Koperasi Wanita	Persentase peningkatan volume usaha KSP/USP	-	-
	Pembinaan Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Riil	Persentase peningkatan usaha koperasi sektor riil	-	-
	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	Jumlah koperasi terbina yang memiliki pengembangan usaha di sektor riil	100 koperasi	140 koperasi
	Bimtek Analisa Pemberian Kredit bagi KSP/USP Koperasi	Jumlah koperasi terbina yang menerapkan teknologi sederhana/manajemen modern	-	-
	Pembinaan dan Pengembangan Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah KSP/ USP yang mengikuti Bimtek	-	-
	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	Jumlah koperasi terbina dalam rangka peningkatan pembiayaan dan usaha simpan pinjam	120 koperasi	120 koperasi
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Persentase usaha mikro mandiri/bankable	-	Dinkop dan UM
	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan produksi	-	-
	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Program Serifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)	Persentase jumlah peserta pelatihan yang konsisten menjalankan usaha pasca pelatihan	-	-

ISU GENDER	RENCANA AKSI	KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	TARGET 2020	TARGET 2021	PELAKSANA
1	2	3	4	5	10	11	12
		Pengembangan Sarana, Kemitraan dan Pemasaran Usaha Mikro	Persentase pengusaha mikro yang menghasilkan produk makanan & minuman	Jumlah pelaku Usaha Mikro yang diintervensi dalam pengembangan sarana, kemitraan dan pemasarannya	200 orang	225 orang	
		Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro		Jumlah pameran/ promosi yang diikuti dlm rangka pemasaran produk usaha mikro	-	-	
		Fasilitasi Pengembangan usaha mikro		Jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengembangan usaha mikro	-	-	
		Pengembangan Manajemen dan Informasi Bisnis		Jumlah pelaku Usaha Mikro terbina dalam pengembangan manajemen dan informasi bisnis	100 orang	125 orang	
		Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan		Jumlah wirausaha baru/ pemula yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dalam rangka mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, menambah pendapatan keluarga	-	-	
		Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan		Jumlah wirausaha baru terbina dalam pengembangan skillnya	300 orang	280 orang	
	Program Pengebangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan pengembangan UMKM melalui pendampingan bagi wirausaha baru		Jumlah WUB yang mengikuti kegiatan agar mampu menaikkan omzet penjualan produk	-	-	Dinkop dan UM
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	Jumlah koperasi terbina yang menerapkan teknologi sederhana/manajemen modern	-	-	Dinkop dan UM
		Pembinaan koperasi wanita dalam rangka pengembangan usaha koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Jumlah pengurus kopwan yang mengikuti kegiatan pembinaan dalam rangka pengembangan koperasi	-	-	
		Pelatihan peran koperasi wanita syaria'ah		Jumlah kopwan yang mengikuti kegiatan pelatihan	-	-	
		Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian		Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian	-	-	
		Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD		Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen pengelolaan koperasi	-	-	

ISU GENDER	RENCANA AKSI	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET		PELAKSANA
				OUTCOME	OUTPUT	2020	2021	
1	2	3	4	5	10	11	12	
		Bimtek Peningkatan kapasitas anggota koperasi sebagai kader koperasi		Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas anggota koperasi	-	-		
		Bimtek revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi		Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek yang perlu mengalami revitalisasi kelembagaan	-	-		
		Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi		Jumlah pengurus/ anggota koperasi yang memperoleh pembinaan kelembagaan serta peningkatan kapasitas SDM koperasi	350 koperasi	350 koperasi		
		Pembinaan, pengawasan, dan perhatian koperasi		Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan penghargaan	240 koperasi	255 koperasi		
		Penilaian Kesehatan bagi KSP/ USP Koperasi		Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	-	-		
		Peningkatan pengawasan bagi pengurus koperasi		Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek audit laporan keuangan	-	-		
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Persentase jumlah masyarakat/ calon WUB yang dibina menjadi wirausaha	Jumlah calon wirausaha baru yang dibina dengan pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja	500 orang	600 orang		Dinkop dan UM
		Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat melalui Pameran Produk Usaha Mikro Kecil Tingkat Lokal maupun Nasional	Persentase jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan produksi	Jumlah event pameran yang diikuti dalam rangka Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat melalui Fasilitasi Pameran Produk Usaha Mikro Kecil Tingkat Lokal maupun Nasional	6 lokasi	6 lokasi		
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Bina Usaha Perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha Berorientasi Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Online dan Konvensional yang dibina	25 pelaku usaha online dan 175 pelaku usaha konvensional	25 pelaku usaha online dan 175 pelaku usaha konvensional		Disperdagin
		Bina Promosi dan Pengembangan Ekspor		Jumlah Produk yang dipromosikan dan pelaku usaha yang dibina	13 produk dan 50 pelaku usaha	13 produk dan 50 pelaku usaha		
		Temu usaha dan kontak dagang		Jumlah komoditi yang dibawa kegiatan temu usaha dan kontak dagang				
		Pasar Murah		Jumlah Komoditi barang yang dibawa ke pasar murah				

ISU GENDER	RENCANA AKSI	INDIKATOR	TARGET	PELAKSANA
1	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	2020
	2	3	4	10
				11
				12
		Monitoring harga sembako dan barang penting lainnya ditingkat pengecer	Jumlah pelaksanaan monitoring sembako dipasar rakyat	
		Monitoring realisasi ekspor impor	Jumlah komoditi ekspor impor	
		Pameran produk dan kerajinan dan industri rumah tangga	Jumlah usaha mandiri masyarakat yang terfasilitasi promosinya	
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah pedagang kaki lima yang dibina secara berkala	Disperdagin
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan (Bidang Industri)	Diversifikasi produk olahan pangan	Jumlah IKM yang dilatih	Disperdagin
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Bidang Industri)	Pembinaan dan Pelatihan keterampilan kerja dan masyarakat melalui pelatihan berbasis Aneka dan	Jumlah tenaga kerja yang meningkatkan kualitas skil individunya bidang aneka dan tekstil	250 IKM
		Pembinaan dan Pelatihan keterampilan kerja dan masyarakat melalui pelatihan berbasis Agro dan kimia	Jumlah tenaga kerja yang meningkatkan kualitas skil individunya bidang agro dan kimia	250 IKM
		Peningkatan peranan wanita dalam industri kecil	Jumlah Peserta pelatihan peningkatan peranan wanita dalam industri kecil	
	Program Pembinaan Lingkungan sosial (Bidang Pasar)	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan /atau Jembatan, Pasar dan sarana Prasarana Pendukung Pariwisata melalui Pembangunan Pasar	Jumlah los dan kios yang terbangun	20 kios
			Jumlah Fasilitas umum pasar yang terbangun menuju pasar ber SNI	20 kios

ISU GENDER	RENCANA AKSI		INDIKATOR	TARGET		PELAKSANA	
	PROGRAM	KEGIATAN		2020	2021		
	2	3	4	5	10	11	
						12	
dan hakim yang didominasi oleh laki-laki; Pejabat struktural maupun		Pendidikan dan pelatihan fungsional dan sertifikasi kompetensi		Jumlah peserta yang lulus diklat fungsional & sertifikasi kompetensi	800 org	800 org	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pengembangan karier ASN	Persentase penempatan pegawai ASN sesuai Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan karir	7636 org	7686 org	Bkpsdm
		Pembinaan disiplin pegawai		Jumlah permasalahan ASN yang ditangani	2101 org	2101 org	
		Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS		Jumlah PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun	14814 org	14830 org	
		Penyusunan kebutuhan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara		Jumlah pengadaan dan kebutuhan Aparatur Sipil Negara	1180 org	1430 org	
	Program Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah dan Risalah	Pembahasan rancangan peraturan daerah non APBD	Prosentase raperda inisiatif DPRD yang disahkan	Jumlah kegiatan pembahasan raperda	20 perda	20 perda	Set DPRD
		Fasilitasi kegiatan Rapat dan peningkatan SDM Pimpinan dan anggota DPRD		Jumlah Rapat dan Risalah	32 rapat	32 rapat	
	Program Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Alat Kelengkapan Dewan	Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran	Prosentase rumusan kebijakan hasil kunjungan kerja yang ditindaklanjuti	Jumlah Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran	4 rekomendasi	4 rekomendasi	Set DPRD
		Fasilitasi Alat Kelengkapan Dewan		Jumlah Fasilitasi Alat Kelengkapan Dewan	132 rapat	132 rapat	
		Fraksi DPRD		Jumlah ketersediaan tenaga ahli fraksi			
		Workshop/Bimbingan Tekhnis Pimpinan dan Anggota DPRD		Jumlah pelaksanaan Workshop/Bimbingan Tekhnis Pimpinan dan Anggota DPRD			
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh		Jumlah pelaksanaan kegiatan hearing dialog			Set DPRD

ISU GENDER 1	RENCANA AKSI		INDIKATOR		TARGET		PELAKSANA
	PROGRAM 2	KEGIATAN 3	OUTCOME 4	OUTPUT 5	2020 10	2021 11	
	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentrangan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Fisik Anggota Satpol PP	Prosentase Ketertiban Umum dan Ketentrangan Masyarakat	Jumlah Pembinaan Fisik dan Samapta Pol. PP	250 org	250 org	Satpol PP
		Lomba Kesamaptaan se Provinsi Jawa Timur		Jumlah Peserta Upacara HUT Satpol PP Se Jawa Timur	71 org	71 org	
		Hari Jadi Satpol PP dan Linmas Kabupaten Jambore Satpol PP		Jumlah Peserta Upacara Satpol PP dan Linmas	600 org	600 org	
				Jumlah peserta Jambore	18 org	18 org	
	Program Penggakan Perundangundangan Daerah dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Pengawalan Pejabat VVIP dan Pejabat Daerah	Prosentase Kasus Pelanggar Perda yang disidik	Jumlah Pengawalan yang dilaksanakan	15 org	15 org	Satpol PP
		Sosialisasi Perda 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentrangan Masyarakat		Jumlah peserta sosialisasi	60 org	60 org	
		Operasi Pembinaan PNS dan Siswa		Jumlah pelaksanaan Operasi Pembinaan PNS dan Siswa	20 kali	20 kali	
		Operasi Tim KOPELTIBKAB		Jumlah pelaksanaan Operasi Tim KOPELTIBKAB dan Pemulangan, Tipiring	43 kali	43 kali	
		Pemulangan dan Pengiriman Pelanggar Perda		Jumlah pelaksanaan Pemulangan dan Pengiriman Pelanggar Perda	23 org	23 org	
		Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman keras dan Narkoba		Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang Peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	40 org	40 org	
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Peningkatan Kemampuan Dasar Bagi Satgas Linmas Kecamatan dan Desa	Prosentase Anggota linmas yang terlatih	Jumlah kegiatan peningkatan kemampuan dasar bagi satgas linmas kec. dan desa	60 kegiatan	60 kegiatan	Satpol PP
		Peningkatan Kemampuan Pam Swakarsa Bagi Satgas Linmas dan Tokoh		Jumlah peserta pelaksanaan Pelatihan			

ISU GENDER 1	RENCANA AKSI PROGRAM 2	KEGIATAN 3	OUTCOME 4	OUTPUT 5	TARGET 2020 10	TARGET 2021 11	PELAKSANA 12
	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Prosentase pembangunan drainase kabupaten dalam kondisi baik	Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara yang mendukung Pendidikan, Kesehatan, Pertumbuhan ekonomi sektor akomodasi dan Investasi daerah	1670 m	1790 m	DPUPR
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Prosentase pengembangan sumber daya air dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara yang mendukung pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	11500 m	12000 m	DPUPR
		Rehabilitasi/pemeliharaan sungai		Panjang saluran sungai yang dinormalisasi	2434 m	2628 m	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat	Prosentase pengelolaan air minum di daerah rawan air	Panjang spam yang terbangun dan terpelihara yang mendukung kesehatan dan pertumbuhan ekonomi sektor akomodasi dan Investasi daerah	1300 m	1400 m	DPUPR
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Prosentase jalan lingkungan yang terbangun	Panjang jalan lingkungan yang dibangun	125 m	125 m	DPUPR
		Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan		Panjang jalan lingkungan yang terpelihara	150 m	150 m	
	Program Pengendalian Banjir	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Prosentase terkendalinya bantaran sungai dari banjir	Panjang bantaran dan tanggul sungai yang direhab dan dipelihara	6500 m	6500 m	DPUPR
	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Persentase Rumah Tidak Layak Humi menjadi Layak Humi	Jumlah rumah layak humi yang ditangani	6836 unit	7136 unit	DPKP
	Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar	Persentase perumahan dan permukiman yang lingkungannya sehat	Jumlah pemanfaat sanitasi dasar	995 kk	1590 kk	DPKP
				Luas kawasan kumuh yang ditangani	24.30 ha	40.30 ha	
		Penyediaan sarana jalan lingkungan di perumahan dan kawasan permukiman		Luas jalan lingkungan di perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun	24.190 m2	25.734 m2	

ISU GENDER 1	RENCANA AKSI		INDIKATOR	TARGET		PELAKSANA	
	PROGRAM 2	KEGIATAN 3		2020 10	2021 11		
	Program Pengelolaan Lingkungan Perkotaan	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan	4 Persentase taman yang dibangun	5 Luas taman yang dibangun	10 25.383 m2	11 34.563 m2	12 DPKP
					1.800 titik	2.280 titik	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan			16.282 m2	25.044 m2	DPKP
					344 titik	344 titik	

BAB V PENUTUP

Demikian Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Situbondo Tahun 2020-2021 ini disusun untuk menjadi pedoman bagi unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo maupun pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan PUG.

Dengan adanya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender ini diharapkan percepatan pelaksanaan pembangunan responsif gender di Kabupaten Situbondo dapat terwujud, dan hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa adanya pengecualian, dengan menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, tumbuhnya pertumbuhan ekonomi, serta semakin terbuka dan mudahnya akses pendidikan dan kesehatan.

Rencana Aksi Daerah ini bersifat dinamis, dapat direview dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan situasi pembangunan di Kabupaten Situbondo. Diharapkan dengan adanya Rencana Aksi Daerah ini pelaksanaan PUG di Kabupaten Situbondo dapat berkontribusi lebih besar dalam mengurangi kesenjangan gender di Indonesia.

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO